



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023



Diterbitkan Oleh :
**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Gambaran Umum Lakip	1
2. Sejarah Kabupaten Enrekang	2
3. Struktur Organisasi	4
4. Kondisi dan Analisis	5
4.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup	5
4.2. Sumber Daya Manusia	8
4.3. Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah	9
a. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
b. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	12
c. Proyeksi Keuangan daerah & Kerangka Pendanaan	13
d. Penggunaan Lahan	14
e. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	15
f. Kawasan Peruntukan Pertanian	16
g. Kawasan Peruntukan Perkebunan	17
h. Kawasan Peternakan	18
i. Kawasan Peruntukan Perikanan	18
j. Kawasan Pertambangan	18
k. Kawasan Industri	19
l. Kawasan Pariwisata	20
m. Kawasan Permukiman	20
n. Kawasan Perdagangan	20
o. Potensi Sumber Daya Air	21
5. Isu Strategis	21
6. Maksud dan Tujuan	22
7. Sistematika LKjIP 2023	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
1. RENCANA SRATEGIK	26
a. Visi dan Misi	26
b. Tujuan dan Sasaran	28

c.	Strategi dan Arah Kebijakan	29
d.	Program Pembangunan Daerah	33
2.	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)	36
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	41
1.	Capaian Indikator Kinerja Utama	42
1.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2022	42
1.2	Perbandingan Capaian Kinerja	47
1.3	Analisis/Penjelasan Capaian Kinerja	62
1.4	Strategis Pemegahaan Masalah	66
2.	Realisasi Anggaran Keuangan	67
2.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022	67
2.2	Belanja Daerah Tahun 2022	68
BAB IV	PENUTUP	76



BUPATI ENREKANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan anugrahnya sehingga Pemerintah Kabupaten Enrekang telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2023.

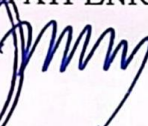
Laporan Kinerja adalah merupakan komitmen nyata dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik. Pertanggungjawaban merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan dalam rangka menggapai cita, citra dan harapan terciptanya sebuah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*). Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Enrekang telah memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu serta Evaluasi Kinerja, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penerbitan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka **“Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS), Yang Berkelanjutan dan Religius”**

Kami harapan dengan Laporan Kinerja ini dapat menjadi salah satu Bahan Evaluasi terhadap Kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya

menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahap berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih Kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2023 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyelesaian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Enrekang, Maret 2024
H. BUPATI ENREKANG,

Dr. H. BABA, SE. MM



BAB I PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk dari azas akuntabilitas. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu dan evaluasi kinerja, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Dalam rangka itu maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2023, merupakan laporan tertulis Pemerintah Kabupaten Enrekang atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat selama Tahun 2023. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang yang berkelanjutan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014, asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan. Asas akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, mencoba membenahi kelemahan pada system perencanaan sebelumnya dengan mengintegrasikan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah secara bersamaan. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme penyusunan dan penetapan perencanaan yang pada ujungnya diharapkan agar permasalahan daerah dan nasional baik melalui dokumen perencanaan daerah maupun melalui dokumen perencanaan nasional dapat dijawab melalui arah pembangunan yang ditetapkan.

2. SEJARAH KABUPATEN ENREKANG

Enrekang berdiri sebagai satu Kabupaten berdasarkan Undang Undang No.29 Tahun 1959 (LN No. 74 Tahun 1959) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dimana Kabupaten Enrekang berdiri sendiri sebagai satu Kabupaten dengan ibukotanya Enrekang.

Kabupaten Enrekang terletak sekitar ± 240 km di sebelah Utara Kota Makassar atau secara geografis terletak antara $3^{\circ}14'36''$ - $3^{\circ}50' 0''$ Lintang Selatan dengan $119^{\circ}40' 53''$ - $120^{\circ}6'330''$ Bujur Timur dengan ketinggian bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di atas permukaan laut dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.

Kabupaten Enrekang secara administrasi terdiri dari 12 Kecamatan yang tersebar dalam 112 Desa dan 17 Kelurahan dan memiliki luas wilayah sekitar $1.786,01 \text{ Km}^2$ atau 178.601 Ha. Luas wilayah Kabupaten Enrekang adalah ± 2.83 % dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Lambang Kabupaten Enrekang berbentuk perisai dengan dasar ungu bergaris pinggir hitam dan didalamnya terdapat lukisan (keterangan gambar Lambang Massenrempulu):

- 1) Di bagian atas bintang sudut lima berwarna kuning di atas satu bidang segi lima dasar hitam.
Perisai dasar ungu diambil dari gelaran Manurung Enrekang “LAKAMUMMU” yang berarti ungu karena Enrekanglah mendapat kehormatan sebagai Ibukota dari lima kerajaan. Kerajaan kecil federasi tadi (sekarang ibukota Kabupaten Enrekang mencerminkan keseluruhan MASSENREMPULU.
- 2) Di bawah keris dan kelewang terhunus bersilang ke atas, berwarna merah tua. Keris dan Kelewang melambangkan pusaka nenek moyang yang dianugerahkan Yang Maha Kuasa pada ke lima kerajaan. Kelima kerajaan digelar “MANURUNG” (tiap-tiap kerajaan tadi mempunyai gelaran sendiri-sendiri), yang juga menggambarkan kepahlawanan warganya sejak dulu kala dan menjadi pusaka turun temurun.
- 3) Ditengah-tengah dua gunung kehijau-hijauan, perkebunan, persawahan dan sungai. Lima Cincin Berantai melambangkan sejarah Pemerintahan MASSENREMPULU, Panca Tunggal, dulu lima Swaparaja dan lima Kecamatan induk.
- 4) Dibawah lima cincin berantai yaitu dua ungu, satu hijau dan satu kuning yang memperhubungkan padi (kiri) dan kopi (kanan) yang masing-masing melengkung ke atas. Warna-warna cincin melambangkan sejarah bahasa daerah MASSENREMPULU yaitu tiga Kecamatan bahasa Duri, satu bahasa Enrekang dan satu bahasa Maiwa.
- 5) Di bagian bawah pita hitam dasarnya dengan tulisan putih MASSENREMPULU. Warna hitam yang terdapat pada lukisan ini melambangkan bahwa warganya adalah sederhana di segala bidang.

MASSENREMPULU adalah daerah yang mempunyai sejarah dan kepribadian tersendiri. MASSENREMPULU jika dijalin dalam bahasa Bugis MASINRING BULU ataupun MABBIRING BULU, artinya sebagian desanya terletak di kaki bukit seakan-akan bersandar di kaki gunung.

Adapun arti dan makna dari lambang Kabupaten Enrekang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Keyakinan rakyatnya dilambangkan oleh Bintang sudut lima yang artinya bahwa rakyat MASSENREMPULU pada umumnya beragama Islam.

- 2) Bintang sudut lima juga melambangkan kehidupan rakyatnya penuh dengan cita-cita tinggi yang berlandaskan Pancasila.
- 3) Padi dan Kopi melambangkan kemakmuran, kerukunan dan kesejahteraan yang didambakan oleh Masyarakat.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi Pemerintah Kabupaten merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar pembangunan daerah.

Menurut pasal 9 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 bahwa Urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum dimana urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan Pemerintahan Pilihan. Pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut maka kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Kabupaten/kota dan atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/kota.

Dengan kewenangan dan prinsip pembagian urusan diberikan kepada daerah, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari pelaku pemerintahan di dalam merumuskan, merencanakan dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah ke dalam pola organisasi pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom. Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah Otonom adalah:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Kedudukan, tugas dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Enrekang, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang;
3. Peraturan Bupati Enrekang Nomor : tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Enrekang (*Penomoran Masing – masing PD/Dinas*)
4. Peraturan Bupati Enrekang Nomor : tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kabupaten Enrekang (*Penomoran Masing – masing PD/Badan*)

Pelaksanaan kegiatan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan, baik yang ditetapkan di tingkat pusat maupun yang ditetapkan di tingkat daerah.

4. KONDISI DAN ANALISIS

4.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan morfologinya, Kabupaten Enrekang merupakan morfologi perbukitan dan pegunungan dengan lereng yang curam serta terbentuk dari batuan sedimen, matafor dan batuan gunung api, yang terdiri dari satuan morfologi:

- 1) Brown Forest Soil terdapat di wilayah perbatasan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang.
- 2) Mediterania coklat keabu-abuan terdapat di wilayah Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Enrekang.
- 3) Mediterania coklat terdapat di wilayah Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Alla.
- 4) Ponsolik coklat dengan bahan induk Tufa Volkan macan terdapat di wilayah dan Kecamatan Maiwa.
- 5) Ponsolik coklat dengan bahan induk batuan pasir serfik dan tufa terdapat di wilayah Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Enrekang

- 6) Ponsolik kekuningan dengan bahan induk seksis terdapat di wilayah Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla.
- 7) Ponsolik merah kekuningan dengan bahan induk batu pasir terdapat di wilayah Kecamatan Maiwa.
- 8) Ponsolik violet dengan bahan induk serpih dan batu pasir terdapat di wilayah Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla.

Di Kabupaten Enrekang terdapat 3 stasiun curah hujan yang dapat memonitor keadaan curah hujan sepanjang tahun di Kabupaten Enrekang, yaitu Stasiun Alla, Stasiun Maiwa, dan Stasiun Baraka. Stasiun Malua termasuk dalam tipe iklim C1. Stasiun Alla digolongkan sebagai tipe E1, dan stasiun Baraka tergolong dalam tipe D1.

Kabupaten Enrekang termasuk daerah yang memiliki curah hujan tinggi, dengan rata-rata curah hujan pertahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019 -2023) sebesar 3.073 mm/th.

Tabel 4.1.1.
Perkembangan Curah Hujan di Kabupaten Enrekang

Stasiun	Curah Hujan per Tahun (mm)				
	2018	2019	2020	2021	2022
401B	2.535	1.214	1.314	3.073	2.860
400I	2.037	1508	1.850	2.138	3.298
400A	1.437	976	1.547	1.695	1.726
399D	1.538	1.154	1.841	1.644	1.881

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2023

Tabel 4.1.2
Perkembangan Hari Hujan di Kabupaten Enrekang

Stasiun	Jumlah Hari Hujan (hr/th)				
	2018	2019	2020	2021	2022
401B	149	155	147	143	190
400I	146	125	168	178	194
400A	145	100	161	164	191
399D	145	136	164	141	146

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2023

Tabel 4.1.3.
Keadaan Iklim (rata-rata) di Kabupaten Enrekang

Keadaan Iklim	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Curah Hujan (mm/th)	1.867	1.328	1.757	1.997	2.118
2. Hari Hujan (hari)	134	118	152	157	173

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2023

Total luas Kabupaten Enrekang didominasi oleh topografi dataran tinggi yang luasnya sebesar 85,1%, dan yang dataran rendah sebesar 14,9%. Topografi wilayah Kabupaten Enrekang dalam kategori dataran tinggi yang terletak pada bagian Barat, Timur, Selatan dan Utara meliputi Kecamatan Alla, Masalle, Baroko, Curio, Anggeraja Baraka, Malua dan Bungin, sedang topografi kategori dataran rendah terhampar pada bagian tengah, yang meliputi Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian Kecamatan Maiwa.

Tabel 4.1.4
Kemiringan Tanah Per Kecamatan Di Kabupaten Enrekang

Kecamatan	Letak Geografis			
	(0-2%)	(2-15%)	(15-40%)	(>40%)
Kriteria	Datar	Landai	Agak Curam	Curam
Luas (Ha)	13.841	12.758	75.175	76.287
Persentase	7,74	7,14	42,39	42,71

Sumber : Profil Kabupaten Dalam Angka 2023

Dengan kondisi fisik seperti ini menyebabkan air curah hujan yang jatuh di wilayah perbukitan akan mengalir sebagai air permukaan. Pemamfaatan air permukaan ini sangat penting karena Kabupaten Enrekang dilalui oleh sungai besar antara lain Sungai Saddang, Sungai mata Allo, dan Sungai Malua, yang peruntukannya terutama untuk kebutuhan irigasi teknis, air bersih, PLTMH dan pemamfaatan lainnya untuk kebutuhan penduduk.

Tabel 4.1.5
Sungai-Sungai Yang Ada di Kabupaten Enrekang

No.	Nama Sungai	Panjang Sungai (km)	Ketinggian Hulu (m)	Ketinggian Hilir (m)	Lokasi
1.	Saddang	39,107	100 – 500	Kurang dari 25	Masalle
					Enrekang
					Cendana
2.	Bulu Cenrana	68,609	100 – 500	Kurang dari	Bungin
					Maiwa
3.	Mata Allo	35,211	500 – 1.000	100 – 500	Alla
					Anggeraja
					Enrekang
4.	Malua	39,366	500 – 1.000	100 – 500	Curio
					Malua
					Baraka

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2023

Secara keseluruhan kondisi geografis dan topografi ini berkaitan langsung dengan potensi pengembangan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Enrekang,

terutama terkait dengan pemamfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan ekonomi di Kabupaten Enrekang, harus tetap terintegrasi dengan upaya pengelolaan konservasi/pelestarian lingkungan.

4.2 Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak 2287.554.000 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 116.291 jiwa (50,88%) dan perempuan sebanyak 111.825 jiwa (49,12%) yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dengan kepadatan penduduk rata-rata 154 jiwa/ Km².

Jumlah penduduk yang besar merupakan keunggulan manakala disertai dengan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban ketika kualitas rendah. Beberapa variabel utama yang mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia pada suatu daerah antara lain tingkat pendidikan, keterampilan, dan derajat kesehatan masyarakat.

Untuk mengetahui secara rinci akan sebaran penduduk di Kabupaten Enrekang, maka berikut ini disajikan komposisi penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan secara jelas disajikan pada tabel berikut ;

Tabel. 4.2.1
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Enrekang Tahun 2023

No.	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Maiwa	14.197	13.952	28.182
2.	Enrekang	18.910	18.525	37.123
3.	Baraka	8.095	7.604	15.699
4.	Anggeraja	14.543	14.268	28.811
5.	Alla	12.736	11.951	24.687
6.	Cendana	4.992	5.052	10.044
7.	Bungin	2.899	2.701	5.600
8.	Malua	4.670	4.623	9.293
9.	Curio	9.367	8.818	18.185
10.	Masalle	7.622	7.293	14.915
11.	Buntu Batu	12.159	11.794	23.953
12.	Baroko	6.246	5.816	12.062
	Jumlah	116.291	112.263	228.554

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel diatas,dapat dijelaskan bahwa Penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2023 tercatat sebanyak 228.554 jiwa.

4.3 Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2023 memberikan gambaran ekonomi makro daerah tahun 2023 serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran Ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan meminimalisir berbagai kendala yang menghambat. Disamping itu langkah-langkah kebijakan yang lebih serius akan ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum dilaksanakan secara optimal selama ini antara lain disektor pertanian, industri dan di wilayah perdesaan serta efektivitas dari kebijakan fiskal akan ditingkatkan dengan mempertajam prioritas pembangunan ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang memberi dampak besar bagi masyarakat luas.

Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan mendorong pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan skses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumberdaya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong dengan berbagai kegiatan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

a. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Selatan ditujukan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mengarahkan pada pertumbuhan ekonomi berkualitas yang penekanannya pada aspek pemerataan pendapatan khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Dengan demikian diharapkan akan dapat dan mampu memecahkan masalah-masalah sosial mendasar terutama kemiskinan dan pengangguran. Dari segi permintaan (*final demand*) peranan konsumsi masih mendominasi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi sementara peranan investasi masih sepertiga dari peran konsumsi. Hal lain yang penting membutuhkan perhatian adalah terjadinya menes Net Ekspor Sulawesi Selatan

dan hal ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu maka kebijakan kedepan diarahkan pada perbaikan iklim investasi dengan membangun sinergitas dan kerjasama yang nyata dengan dunia usaha baik dalam maupun luar negari. Investasi tersebut diharapkan untuk mendukung sektor industri pengolahan, untuk memperbaiki iklim usaha pada industri kecil dan menengah secara berkesinambungan dan industri besar untuk jangka panjang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah pada suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah, sementara PDRB menurut harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh factor harga. Gambaran mengenai perkembangan PDRB Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023 menurut lapangan usaha tahun dasar 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 4.3.1 dan 4.3.2

Tabel 4.3.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Enrekang Tahun 2018 - 2022 (miliar Rp)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	2.636,10	2.810,67	2.922,50	3.302,07	3.613,18
B. Pertambangan & Penggalian	262,88	267,30	277,88	298,98	316,90
C. Industri Pengolahan	857,90	1.023,08	1.020,29	1.078,61	1.243,05
D. Pengadaan Listrik & Gas	6,65	6,99	7,27	8,18	8,45
E. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	5,12	5,35	5,92	6,43	6,81

F. Konstruksi	856,32	945,99	963,90	1.037,95	1.125,56
G. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Motor	557,79	590,48	599,78	648,14	710,02
H. Transportasi & Pergudangan	90,16	94,80	92,19	105,85	138,15
I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	51,02	58,28	58,56	59,75	70,75
J. Informasi & Komunikasi	209,63	221,06	247,92	276,79	291,84
K. Jasa Keuangan & Asuransi	196,25	208,60	212,78	228,74	254,71
L. Real Estate	191,39	205,89	227,60	236,99	253,29
M. Jasa Perusahaan	2,30	2,59	2,64	2,71	3,26
N. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jamsos Wajib	513,46	546,12	556,42	550,93	559,33
O. Jasa Pendidikan	115,66	128,25	135,91	142,91	145,66
P. Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	131,60	142,89	157,07	175,50	191,26
Q. Jasa Lainnya	35,56	39,90	40,01	43,59	53,09
PDRB	6.719,80	7.298,24	7.528,64	8.204,11	9.024,31

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Enrekang pada tahun 2023 yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 9.024,31 milliar, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 8.204,11 milliar rupiah. Kontribusi terbesar diperoleh dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3.613,18 milliar rupiah. Hal ini jelas menggambarkan bahwa perekonomian Kabupaten Enrekang sangat didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Tabel 4.3.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Enrekang Tahun 2018 - 2022 (miliar Rp)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	1.642,78	1.726,32	1.729,39	1.906,33	1.922,35
B. Pertambangan & Penggalian	151,50	152,12	154,60	157,59	162,71
C. Industri Pengolahan	320,54	374,00	365,27	379,82	422,68
D. Pengadaan Listrik & Gas	6,56	6,83	7,25	7,73	7,84
E. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	4,91	5,08	5,53	5,88	6,19
F. Konstruksi	637,41	665,20	677,35	698,85	713,83

G. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Motor	471.53	487,24	493,12	519,06	545.08
H. Transportasi & Pergudangan	47.09	48,57	45,78	49,46	55.50
I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	36.55	39,69	38,54	38,91	43.97
J. Informasi & Komunikasi	206.99	215,77	240,03	267,15	277.08
K. Jasa Keuangan & Asuransi	119.18	122,83	123,85	129,37	134.58
L. Real Estate	122.99	129,66	136,52	141,91	147.46
M. Jasa Perusahaan	1.20	1,32	1,30	1,33	1,53
N. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jamsos Wajib	325.15	337,42	337,83	331,13	358.00
O. Jasa Pendidikan	91.94	98,20	103,44	108,58	112.73
P. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	91.87	99,08	106,56	113,18	122.16
Q. Jasa Lainnya	23.86	26,23	25,86	28,10	31.70
PDRB	4.302.05	4.535.55	4.592.23	4.884.37	5.065.36

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel 4.3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa perekonomian Kabupaten Enrekang berdasarkan harga konstan selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2018 PDRB Kabupaten Enrekang berkisar 4.302.05 miliar rupiah, terus meningkat sampai tahun 2022 menjadi sebesar 5.065.36 miliar rupiah. Kontribusi terbesar penyumbang PDRB Kabupaten Enrekang berasal lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Dari besaran PDRB dari tahun ke tahun, baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan, dapat diketahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dengan membandingkan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang dapat diketahui dari besaran PDRB dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.

b. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun bersangkutan. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

c. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sebuah daerah dapat dikatakan mandiri adalah apabila mampu melakukan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, di mana salah satunya adalah sumber daya keuangan. Namun Kabupaten Enrekang merupakan salah satu daerah yang belum dapat dikatakan mandiri terutama dari sisi keuangan dimana hal tersebut nampak pada tingginya ketergantungan fiskal daerah dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat.

Sampai dengan tahun 2023, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat, belum pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan fiskal yang tinggi tersebut sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya.

Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan yang terjadi di masing-masing komponen pendapatan daerah. Kinerja keuangan daerah Kabupaten Enrekang tahun 2023 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Namun demikian, kerangka pendapatan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian nasional dan daerah, besaran dana transfer dari pemerintah serta transfer dana dari pemerintah provinsi baik berupa dana bagi hasil maupun bantuan keuangan. Realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3.3
Realisasi & Proyeksi/Target Pendapatan Kab. Enrekang (2019 - 2023)

No	Uraian	Jumlah APBD				
		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1.1	Pendapatan Asli Daerah	118.460.524.625,-	78.187.506.443,-	74.950.576.776,-	102.357.695.188.18	102.357.695.188.18
1.1.1	Pajak Daerah	10.523.206.720,-	12.592.294.716,-	13.400.072.275,-	16.231.913.936.18	16.231.913.936.18
1.1.2	Retribusi Daerah	30.088.974.108,-	35.392.396.598,-	26.900.470.488,-	51.972.678.692.00	7.952.169.253.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	16.741.119.760,-	15.412.302.384,-	15.896.115.974,-	13.466.084.356.00	13.407.363.620.00
1.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	15.896.734.675.35	14.790.512.745,-	18.753.918.039,-	20.687.018.204.00	54.586.415.413.78
1.2	Dana Transfer	743.531.374.000,-	721.882.307.492,-	916.110.206.456,-	916.110.206.456.00	977.184.129.416.00
1.2.1	Pendapatan Transfer Antar Daerah	8.338.348.132,-	10.183.853.000,-	38.229.534.679,-	56.645.528.182.00	70.235.804.989.00
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	559.038.403.000,-	570.417.289.000,-	877.880.671.777,-	823.676.440.803.00	906.948.324.427.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	202.557.310.155,-	223.995.100.000,-	-	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	129.191.091.826,-	39.730.150.00,-	41.879.967.453,-	2.300.00	-
1.3.1	Hibah	42.388.327.915,-	39.730.150.000,-	3.213.000.000,-	2.300.00	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan	42.710.429.746.23-	40.454.575.653,-	38.666.967.453,-	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	115.526.328.000,-	150.821.257.000,-	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemerintah Daerah Lainnya	9.858.646.400,-	3.134.490.600,-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah		946.648.050.605,-	1.103.986.718.250,-	976.840.113.246,-	1.032.940.750.685,-	1.067.524.025.260.48

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

d. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan Kawasan budidaya untuk Kabupaten Enrekang yang terdiri dari Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Arahana Penggunaan Lain. Secara umum Kawasan budidaya mencapai luas 108,770.51 Ha atau kurang lebih 60,00% dari total luas Kabupaten. Pola penyebaran arahan pemanfaatan Kawasan budidaya di Kabupaten Enrekang belum merata diseluruh kecamatan dan tidak semua arahan pemanfaatan lahan dalam RTRW Kabupaten Enrekang ini telah sesuai pemanfaatannya saat ini. Oleh karenanya perlu pula diketahui kondisi pemanfaatan aktual dari masing-masing arahan tersebut, sebagai dasar program pengembangannya.

e. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Hutan merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam tatanan lingkungan di bumi ini. Hutan memiliki banyak fungsi yang sangat penting dan berguna bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Hutan sebagai penghasil gas oksigen (O₂), hutan juga dapat mencegah timbulnya berbagai macam bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, erosi, dan bahkan sebagai penahan gelombang laut yang besar. Selain itu, hutan juga sebagai tempat tinggal bagi jutaan flora dan fauna. Kriteria untuk kesesuaian lahan sebagai areal hutan produksi mengacu kepada kriteria yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian No 683/KPTS/Um/8/1982 tanggal 8 Agustus 1981. Arahkan Kawasan hutan produksi dilakukan dengan pemanfaatan hutan dan pelestarian hasil (kayu dan non kayu), sehingga diperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi yang maksimal bagi masyarakat yang tinggal atau disekitar Kawasan hutan. Luas Kawasan hutan produksi di Kabupaten Enrekang dalam hal ini hutan produksi terbatas adalah sekitar 9.864,83 ha. Penyebaran lokasi hutan produksi di masing-masing kecamatan di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.3.4
Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Enrekang

NO	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	LUAS (Ha)	(%)
01	Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Alla	361,54	3.66
02	Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Anggeraja	1.580,82	16.02
03	Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Baroko	153,41	1.56
04	Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Cendana	1.145,80	11.61
05	Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Enrekang	863,11	8.75
06	Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Maiwa	3.646,27	36.96
07	Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Masalle.	2.113,88	21.43
	Jumlah	9.864,83	100.00

Sumber: Dok.RTRW Kabupaten Enrekang

Selain Kawasan hutan produksi terbatas tersebut, beberapa lokasi di Kabupaten Enrekang diarahkan pengembangan budidaya tanaman

agroforestry. Agroforestry merupakan system pertanian yang beberapa macam bidang yaitu pertanian, ternak dan kehutanan. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan diwilayah Kabupaten Enrekang, arahan kesesuaian lahan agroforestry diKabupaten Enrekang kurun waktu lima tahun terakhir dapat diperlihatkan pada table berikut;

Tabel : 4.3.5
Arahan dan Luas Budidaya Tanaman Agroforestry

No.	Kecamatan	Luas(Ha)	%
1	KEC. ALLA	558,86	1.89
2	KEC. ANGGERAJA	1,046.71	3.53
3	KEC. BARAKA	2,087.30	7.04
4	KEC. BAROKO	1,574.98	5.31
5	KEC. BUNGIN	9,605.11	32.41
6	KEC. BUNTUBATU	2,458.07	8.29
7	KEC. CENDANA	1,179.85	3.98
8	KEC.CURIO	227.68	0.77
9	KEC.ENREKANG	5,936.87	20.03
10	KEC. MAIWA	3,135.51	10.58
11	KEC. MALUA	115.64	0.39
12	KEC. MASALLE	1,711.05	5.77
Luas		29,637.63	100.00

f. Kawasan Peruntukan Pertanian

Untuk kepentingan rencana pola ruang pertanian wilayah Kabupaten Enrekang lokasi yang potensial untuk padi sawah, jagung, kacang tanah, dan ubi jalar dikelompokkan menjadi satu, disebut lahan pertanian tanaman pangan unggulan. Padi sawah dikategorikan kedalam komoditi unggulan tanaman pertanian lahan basah sedangkan tanaman jagung, kacang tanah dan ubi jalar dikategorikan kedalam komoditi unggulan tanaman pertanian lahan kering.

Tabel :4.3.6
Arahan dan Luas Budidaya Lahan Pertanian

No	Kecamatan	Lahan Basah (Ha)	%	Lahan Kering (Ha)	%
1	KEC. ALLA	214.89	4.19		
2	KEC. ANGGERAJA	85.62	1.67		
3	KEC. BARAKA	1247.62	24.35		
4	KEC. BAROKO	135.12	2.64		
5	KEC. BUNGIN	103.38	2.02		
6	KEC. BUNTU BATU	505.02	9.86		

7	KEC. CENDANA	1088.83	21.25	531.51	4.81
8	KEC. CURIO	591.87	11.55		
9	KEC. ENREKANG	505.88	9.87	1231.1	11.15
10	KEC. MAIWA	287.79	5.62	9276.31	84.03
11	KEC. MALUA	324.61	6.34		
12	KEC. MASALLE	33.07	0.65		
JUMLAH		5123.70	100.00	11038.92	100.00

Sumber: Dok.RTRW Kabupaten Enrekang

g. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kriteria kawasan peruntukan perkebunan meliputi:

1. Kawasan perkebunan (skor<125)/berada di luar kawasan lindung
2. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan
3. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan perkebunan mampu memberikan manfaat:
 - Meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
 - Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - Meningkatkan fungsi lindung;
 - Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam untuk pertanian pangan;
 - Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - Menciptakan kesempatan kerja;
 - Meningkatkan ekspor;
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel :4.3.7
Arahan dan Luas Kawasan Peruntukan Perkebunan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	%
1	KEC. ALLA	1160.05	2.57
2	KEC. ANGGERAJA	568.32	1.26
3	KEC. BARAKA	5384.65	11.91
4	KEC. BAROKO	798.86	1.77
5	KEC. BUNGIN	2667.07	5.90
6	KEC. BUNTU BATU	1479.67	3.27
7	KEC. CENDANA	4194.11	9.27
8	KEC. CURIO	10027.11	22.17
9	KEC. ENREKANG	6808.85	15.06
10	KEC. MAIWA	7150.56	15.81
11	KEC. MALUA	4490.47	9.93
12	KEC. MASALLE	492.14	1.09
JUMLAH		45221.86	100.00

Sumber: Dok.RTRW Kabupaten Enrekang

h. Kawasan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Enrekang berupa Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar terutama di Kecamatan Maiwa dan sebagian di Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Cendana, Kecamatan Curio, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Alla, Kecamatan Baroko, Bungin, Kecamatan Malua dan Kecamatan Masalle.

Tabel :4.3.8
Arahan dan Luas Kawasan Budidaya Peternakan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	%
1	KEC. BARAKA	2.17	0.25
2	KEC. BUNTU BATU	17.32	1.96
3	KEC. ENREKANG	148.71	16.81
4	KEC. MAIWA	691.87	78.23
5	KEC. MASALLE	24.39	2.76
JUMLAH		884.46	100.00

Sumber: Dok.RTRW Kabupaten Enrekang

i. Kawasan Peruntukan Perikanan

Pengembangan perikanan di Kabupaten Enrekang merupakan budidaya perikanan darat, yang dikelola dengan sistem tumpang sari pada budidaya pertanian sawah. Usaha perikanan darat tersebut tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang terutama di kecamatan-kecamatan; Baraka, Cendana, Curio, Enrekang, Buntu Batu, Baroko, Malua, Maiwa dan Alla.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan tangkap di Kabupaten Enrekang diarahkan ke Sungai Saddang, Sungai Mata Allo, dan Sungai Bila; dan Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Enrekang meliputi budidaya mina padi dan budidaya kolam di Kecamatan Baraka, Kecamatan Cendana, Kecamatan Curio, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Baroko, Kecamatan Malua, Kecamatan Maiwa, dan Kecamatan Alla.

j. Kawasan Pertambangan

Dari delapan blok pertambangan minyak yang telah teridentifikasi di Provinsi Sulawesi Selatan, salah satunya termasuk di dalam wilayah Kabupaten Enrekang yakni blok minyak Enrekang. Selain minyak beragam bahan tambang galian potensiil juga tersebar di wilayah Kabupaten Enrekang yang saat ini ada yang belum di eksplorasi dan ada pula yang sedang tahap eksplorasi. Diarahkan jika ekplorasi tambang ini dilaksanakan akan mampu menyebabkan bertambahnya daya ungkit perekonomian wilayah Enrekang dan sekaligus

meningkatkan ekonomi rakyat melalui kebijakan CSR, selain itu harus pula dipikirkan pembangunan sumber pendapatan baru dari hasil keuntungan penambangan ini, serta revitalisasi fungsi lingkungan pasca tambang.

Pengembangan pertambangan di Kabupaten Enrekang diarahkan sebagai berikut:

- Kawasan peruntukan pertambangan batuan yang terdiri atas:
 - Kawasan potensi pertambangan marmer ditetapkan di Kecamatan Anggeraja;
 - Kawasan potensi pertambangan tanah Hat ditetapkan di Kecamatan Baroko, Kecamatan Curio, dan Kecamatan Anggeraja; dan
 - Kawasan potensi pertambangan kerikil berpasir alami ditetapkan di Kecamatan Bungin, Kecamatan Buntu Batu, dan Kecamatan Malua.
- Kawasan peruntukan pertambangan batubara ditetapkan di Kecamatan Baraka, dan Kecamatan Enrekang.
- Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi berupa kawasan potensi pertambangan minyak dan gas bumi Blok Enrekang yang terdapat di Kabupaten Enrekang ditetapkan di Kecamatan Masalle Desa batu Ke'de, Kecamatan Alla, Kecamatan Baraka, Kecamatan Baroko, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Cendana, Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Anggeraja.

k. Kawasan Industri

Kawasan industri merupakan kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengembangan kawasan industri dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya, meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya, meningkatkan pendapatan masyarakat, nasional dan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Enrekang diprioritaskan pada jenis industri hasil pertanian (Agroindustri). Rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Enrekang diarahkan pada pengembangan agro industri sesuai dengan potensi Kabupaten Enrekang saat ini dan potensi perkembangan di masa mendatang. Jenis-jenis industri yang direncanakan dan memiliki potensi pengembangan yang cukup baik, adalah: pengolahan kopi, industri pengolahan buah-buahan dan jenis agroindustri lainnya.

Lokasi-lokasi pengembangan industri tersebut sesuai dengan struktur ruang Kabupaten Enrekang yaitu pusat pengembangan diarahkan pada Kawasan Industri Maiwa (KIWA) di Kecamatan Maiwa yang terpadu dengan kegiatan perkebunan dan perternakan serta sub-sub pengembangannya yang sekaligus sebagai pusat pengumpul bahan baku adalah Kecamatan Alla, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Curio. Sedangkan kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di PKL, PKLp dan PPK.

l. Kawasan Pariwisata

Beragam tujuan maupun obyek wisata dalam berbagai aspek seperti daya tarik keindahan alam, budaya, sejarah, olahraga, konvensi dan belanja tersebar di kawasan perdesaan maupun perkotaan di wilayah Enrekang.

Pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Enrekang direncanakan secara terpadu dengan kegiatan wisata di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Dalam hal ini Kabupaten Enrekang tidak berperan sebagai tujuan akhir pariwisata, tetapi lebih kepada peran sebagai tempat transit perjalanan parawisata. Secara umum kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Enrekang terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya, kawasan peruntukan pariwisata alam dan kawasan peruntukan pariwisata buatan.

m. Kawasan Permukiman.

Permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan konsekwensi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang sangat intensif dalam pemanfaatan ruang darat, perairan maupun udaranya. Walaupun demikian agar masih tetap tumbuh berkembang hubungan sosial yang harmonis antar manusia, hubungan simbiosis mutualistis antar manusia dengan alam dan hubungan transendental yang kondusif antar manusia terhadap Tuhan, maka tatanan kawasan permukiman perkotaan yang terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan seperti jalan, drainase, prasarana limbah cair maupun padat dan gas diarahkan pembangunannya tetap menjaga interkoneksi tersebut di atas. Pola permukiman perkotaan khususnya daerah yang rawan terhadap bencana alam harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam berupa lapangan terbuka.

n. **Kawasan Perdagangan**

Berdasarkan pandangan yang sama dalam pengembangan sektor industri, maka sektor perdagangan juga diarahkan pengembangannya untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Oleh karena itu kawasan perdagangan juga diarahkan tumbuh berkembang terpadu dengan pengembangan kawasan industri lokal di sentra-sentra produksi di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang. Kawasan perdagangan Pasar Enrekang akan diarahkan lebih berkembang sebagaimana pasar-pasar kabupaten lainnya, demikian pula dengan pasar Belajen direncanakan akan terpadu dengan pengembangan kawasan agropolitan Belajen. Untuk Pasar Cakke seyogyanya dikembangkan menjadi pasar semi modern berupa minimarket, atau swalayan yang tetap terpadu dengan pasar tradisional yang ada saat ini. Untuk kawasan perdagangan skala yang lebih kecil diarahkan pembangunannya di ibukota-ibukota Kecamatan.

o. **Potensi sumberdaya Air**

Sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Enrekang cukup potensial dimanfaatkan untuk irigasi. Hal ini ditandai dengan terdapatnya 4 sungai besar, yaitu:

- Sungai Saddang yang melalui 2 kecamatan, yaitu: Kecamatan Enrekang , dan Kecamatan Cendana.
- Sungai Mata Allo, yang melalui Kecamatan Alla, Anggeraja dan Enrekang .
- Sungai Malua, melalui Kecamatan Curio, Malua, dan Baraka.
- Sungai Bulu Cendrana, yang melalui Kecamatan Bungin dan Kecamatan Maiwa.

Aliran sungai ini tersebut, disamping digunakan untuk kepentingan sektor pertanian, khususnya untuk persawahan/irigasi, juga untuk keperluan lainnya seperti penyediaan air bersih bagi warga masyarakat yang ada disekitarnya. Potensi sumber daya air di Kabupaten Enrekang dipengaruhi oleh keadaan curah hujan yang hampir merata disetiap tahun.

Disamping itu, potensi air ini telah dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik baik dalam kapasitas PLTMH yang telah lama dimanfaatkan.

5. ISU STRATEGIS

Di dalam Permendagri 86/2017 disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan

panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Sejak pertama kali ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO), virus COVID-19 menyebar dengan sangat cepat dan memberi dampak yang sangat besar tidak hanya pada aspek kesehatan, namun juga pada aspek sosial dan ekonomi. Pandemi COVID-19 di Indonesia tidak diragukan lagi berdampak negatif dan signifikan terhadap perekonomian nasional hingga daerah. Berbagai kebijakan baik di level nasional maupun daerah secara langsung mempengaruhi kemampuan daerah, misalnya kewajiban untuk melakukan refocussing dan realokasi anggaran untuk mencegah dan menangani pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut sangat mempengaruhi komposisi pendapatan dan belanja daerah, termasuk di Kabupaten Enrekang. Sebagian besar belanja daerah yang sudah diperuntukkan untuk beberapa program, harus ditunda atau dibatalkan sebab anggarannya dialokasikan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Melihat perkembangan yang ada saat ini, nampaknya pandemi COVID-19 masih akan tetap ada di Indonesia dalam beberapa tahun kedepan. Oleh karena itu, kegiatan pemerintah daerah selanjutnya harus memasukkan COVID-19 sebagai variabel penghambat yang mesti dicarikan jalan keluar agar dampak negatifnya bisa diminimalisir.

6. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dimana hal terpenting yang diperlukan adalah adanya pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu dan evaluasi kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, dimana laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Adapun Tujuan Pelaporan Kinerja ini yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Enrekang dilakukan melalui tahapan pengumpulan data kinerja kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang yang berisi Indikator Kinerja, Rencana dan Realisasi Kegiatan. Selanjutnya, menghitung Capaian Kinerja antar unsur Indikator Kinerja Kegiatan dengan cara membandingkan Realisasi dan Target. Langkah akhir dari proses penyusunan LKjIP adalah melakukan analisis atas capaian kinerja kegiatan dan sasaran untuk kemudian dilakukan evaluasi atas masing-masing capaian indikator kinerja yang diukur.

7. SISTEMATIKA LKjIP 2023

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Enrekang ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya faktor-faktor yang menyebabkan kinerja (*performance*) tidak tercapai ataupun kinerja yang berhasil melampaui target yang ditetapkan. Sistematika penyajian Laporan Instansi Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I *Pendahuluan*, pada bagian ini disajikan penjelasan umum tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Enrekang dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic Issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II *Perencanaan Kinerja*, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018 - 2023 serta kaitannya dengan capaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Bab III *Akuntabilitas Kinerja*,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV *Penutup*, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategik Instansi Pemerintah, yang setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program serta menyediakan ukuran keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Perencanaan strategik setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju ke sana” dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Rencana strategik merupakan alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategik.

1. RENCANA STRATEGIK

Pemerintah Kabupaten Enrekang mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2018 -2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Enrekang yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai di tahun 2022 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2022.

a. Visi dan Misi

Visi merupakan kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Dalam perspektif dokumen RPJMD, visi berarti kondisi yang hendak diwujudkan hingga lima tahun yang datang. Perspektif RPJMD perubahan, berarti hingga tahun tersisa periode RPJMD bersangkutan, dalam hal ini hingga 2023.

Kabupaten Enrekang dalam mewujudkan mimpi bersama bagi pelaksanaan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) yang berkelanjutan dan Religius”.

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni Enrekang yang Maju, Aman, Sejahtera, Berkelanjutan dan Religius. Kelima pokok visi tersebut, dengan diawali pemaknaan “Enrekang” sebagai entitas dari suatu kesatuan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Enrekang yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Enrekang” yang dicita-citakan dan diharapkan ke depan, sebagai berikut:

1. **Enrekang Maju**, dimaknai sebagai kondisi dimana Enrekang mencapai peningkatan perekonomian daerah, kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan), ketersediaan infrastruktur yang memadai disertai dengan penerapan teknologi.
2. **Enrekang Aman**, mengandung makna Enrekang mencapai keadaan yang lebih kondusif untuk berlangsungnya aktivitas pemerintahan, sosial budaya, aktivitas ekonomi dan investasi, yang ditandai dengan adanya rasa aman untuk berusaha/berinvestasi, bekerja, beribadah serta aman dari bencana. Keadaan

yang menggambarkan perwujudan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermutu.

3. **Enrekang Sejahtera**, dimaknai Enrekang dalam keadaan mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya IPM, pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, serta terpenuhinya dan mencukupinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material.
4. **Enrekang yang Berkelanjutan**, selain mengandung makna pembangunan di Enrekang yang lebih akseleratif dan berkesinambungan antar periode dan tahapan pembangunan yang dijalani sehingga tercipta Enrekang yang lebih maju, lebih aman dan lebih sejahtera (EMAS), juga dimaknai dengan pembangunan yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Selain itu, dalam paradigma dan perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dianut dewasa ini, memastikan penyelenggaraan empat pilar pembangunan berkelanjutan yakni: pilar pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, lingkungan hidup, tata kelola yang baik.
5. **Enrekang yang Religius**, mengandung dua makna pokok yakni : (i) Enrekang diartikulasikan sebagai Dimensi dari Insan yang Bertaqwa, yakni Prilaku Taat dan Takut Kepada Tuhan yang Maha Esa, atas Kesadaran Sendiri, baik dikalangan Masyarakat Umum maupun dikalangan Penyelenggara Pemerintah Daerah, sehingga Prilaku Korupsi dan Indisipliner dalam menjalankan Tugas dapat dihindari. (ii) Enrekang sebagai Entitas Masyarakat yang memiliki Pengembangan Kepribadian dan Berkarakter Teguh terhadap Nilai – Nilai Agama, mempunyai Kepekaan Sosial yang tinggi, serta mengatasi Persoalan dengan baik, bijak dan tegas.

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Enrekang dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

Rumusan misi di dalam dokumen RPJMD dimaknai sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi rumusan tujuan dan sasaran. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan lima pokok visi tertentu yang relevan dan didukung pencapaiannya. Dengan demikian, rumusan misi ini sekaligus juga menderivasi rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan, hingga akhir periode pembangunan ini pada tahun 2023. Dirumuskan lima misi RPJMD Kabupaten Enrekang periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik,**
2. **Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa,**
3. **Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam berbagai Aktivitas Kehidupan Masyarakat tanpa Diskriminasi,**
4. **Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Skala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri,**
5. **Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan.**

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Enrekang selama 5 (lima) tahun (2018 – 2023) dengan uraian sebagai berikut.

1. Tujuan dan Sasaran pada Misi 1 (Meningkatnya Ketersedian dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik) adalah:

Tujuan	Sasaran
1. Menciptakan pembangunan yang merata bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan.	1. Meningkatnya aksesibilitas ke pusat-pusat produksi do perdesaan
	2. Meningkatnya kualitas, utilitas dan keindahan pada layanan dasar perkotaan

2. Tujuan dan Sasaran pada Misi 2 (Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa) adalah:

Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing dan berkarakter religius	1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan
	2. Kesehatan dan pendidikan
	3. Meningkatnya akses dan aplikasi teknologi terapan oleh masyarakat
	4. Meluasnya penerapan nilai spiritual dalam hidup bermasyarakat

3. Tujuan dan Sasaran pada Misi 3 (Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi) adalah:

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1. Terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabilitas dan berkualitas
	2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan
	3. Terciptanya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan

4. Tujuan dan Sasaran pada Misi 4 (Meningkatkan Perekonomian daerah dan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri) adalah:

Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang akseleratif dan inklusif	1. Meningkatnya realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja sector unggulan daerah
	2. Menguatnya peran pelaku ekonomi kecil dan menengah serta masyarakat kurang mampu
	3. Meningkatnya nilai dan produktivitas komoditas unggulan daerah
	4. Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah

5. Tujuan dan Sasaran pada Misi 5 (Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal yang Berwawasan Lingkungan) adalah:

Tujuan	Sasaran
1. Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan memperhatikan aspek lingkungan	1. Meluasnya penerapan system pertanian organisme dan ramah lingkungan

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program yang menjadi kewenangan daerah.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Dalam kaitan ini, arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

- 1) Perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah;
- 2) Perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan melalui program pembangunan daerah dan program prioritas berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perencanaan strategik ini didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui program prioritas masing-masing urusan. Dalam perumusan strategi pembangunan daerah ada empat perspektif yang digunakan dalam mengarahkan keselarasan dengan pilihan program pembangunan daerah yakni :

- 1) Perspektif masyarakat/layanan;
- 2) Perspektif proses internal;
- 3) Perspektif kelembagaan;
- 4) Perspektif keuangan.

Berdasarkan pemahaman demikian, strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Strategi dari Tujuan, dan Sasaran berdasar Misi

Tujuan	Sasaran	Strategi
VISI : Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) Yang Berkelanjutan dan Religius		
MISI I : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik		
1. Menciptakan pembangunan yang merata bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan	1. Meningkatnya aksesibilitas ke pusat-pusat produksi di perdesaan	Memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dari pusat kota ke pusat-pusat produksi yang ada di perdesaan
	2. Meningkatnya kualitas, utilitas dan keindahan pada layanan dasar perkotaan	Meningkatkan kebersihan dan keindahan serta kualitas sarana dan prasarana layanan dasar serta penataan ruang publik perkotaan
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI II : Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa		
1. Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat	1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan Kesehatan dan pendidikan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana penunjang layanan Kesehatan dan Pendidikan dengan melihat pada aspek pemerataan secara proporsional di setiap wilayah
	2. Meningkatnya akses dan aplikasi teknologi terapan oleh masyarakat	Mengembangkan jaringan teknologi informasi serta pembinaan literasi masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi dalam mendukung setiap aktivitasnya
	3. Meluasnya penerapan nilai spiritual dalam hidup bermasyarakat	Mengembangkan sarana dan prasarana ibadah serta mendorong peningkatan aktivitas lembaga-lembaga keagamaan dalam berperan memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI III : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi		
1. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1. Terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabilitas dan berkualitas	Mendorong penguatan tata Kelola dan profesionalisme aparatur yang didukung oleh system teknologi informasi yang relevan, akuntabilitas, dan mendukung inovasi secara berkelanjutan
		2. Terwujudnya ketentraman dan

	ketertiban masyarakat serta perlindungan	perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat
	3. Terciptanya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Memastikan adanya aspek pengarusutamaan gender dan masyarakat berkebutuhan khusus dalam setiap proses pembangunan daerah
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI IV : Meningkatkan Perekonomian daerah dan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri		
1. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang akseleratif dan inklusif	1. Meningkatnya realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja sector unggulan daerah	Membangun iklim investasi yang kondusif serta berperan aktif dalam setiap upaya mendatangkan investor khususnya pada sector unggulan daerah
	2. Menguatnya peran pelaku ekonomi kecil dan menengah serta masyarakat kurang mampu	Meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM dan masyarakat kurang mampu melalui pembinaan dan pelibatan langsung pada aktivitas penciptaan nilai tambah komoditas unggulan daerah
	3. Meningkatnya nilai dan produktivitas komoditas unggulan daerah	
	4. Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Mendorong kemandirian dan ketahanan pangan melalui pengembangan keanekaragaman pangan local berbasis masyarakat
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI V : Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal yang Berwawasan Lingkungan		
1. Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan memperhatikan aspek lingkungan	1. Meluasnya penerapan system pertanian organik dan ramah lingkungan	Mendorong kelompok tani dalam melakukan peralihan kepada system pertanian organik dan ramah lingkungan melalui dukungan yang riil

Kebijakan Pembangunan

 Arah Kebijakan Tahun 2023:

Tahun 2023 merupakan tahapan pembangunan yang memberikan penekanan pada tema sentral pembangunan: “Pemantapan Kualitas Pembangunan Daerah”. Dengan tema tersebut maka arah kebijakan yang

diprioritaskan pada tahun 2023 mencakup:

1. Penataan dan pengembangan sarana-prasarana keindahan kota;
2. Melakukan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan di setiap wilayah;
3. Pengembangan kualitas sistem tata kelola serta perencanaan, penganggaran dan pembangunan melalui inovasi-inovasi baru;
4. Akselerasi partisipasi masyarakat mewujudkan keamanan dan ketertiban;
5. Penguatan peran pelaku UMKM dan masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan daerah.

Meskipun masing-masing tahapan mendukung tercapainya tujuan tertentu, namun bukan berarti tujuan tersebut diupayakan dan dituntaskan pada tahap yang bersangkutan, namun hal ini hanya merupakan pemusatan perhatian atau arah. Masing-masing upaya pada setiap tahapan merupakan satu kesatuan untuk mendukung tercapainya Enrekang (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius dalam kurun waktu 2018 - 2023.

d. Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah sebagai program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Perubahan RPJMD 2018-2023 yang akan datang. Perumusan Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Artinya, program pembangunan daerah merupakan upaya yang hendak dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan prioritas dan sasaran.

Program pembangunan merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023. Program prioritas tersebut memiliki narasi yang berbeda dengan Nomenklatur program yang sudah ditetapkan dalam Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan program sesuai dengan regulasi tersebut dan hasil pemetaanya sebagai berikut.

Tabel 2.2
Hasil Penyesuaian Nomenklatur Program Pembangunan Daerah dengan
Keppmendagri No.050-3708 Tahun 2020

No	Program Pembangunan Daerah (Prioritas Kepala/Wakil Kepala Daerah)	Nomenklatur Program Berdasarkan Permendagri 90/Kepmen 050
1	Pengembangan jaringan jalan perdesaan dan perkotaan	Program Penyelenggaraan Jalan
2	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan jaringan pengairan lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
4	Penataan kawasan pemukiman, Taman dan Keindahan Kota	Program Pengembangan Permukiman
5	Pengembangan saluran drainase/gorong-gorong terintegrasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
6	Rehabilitasi rumah layak huni korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah	Program Pengembangan Perumahan
7	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Perkotaan dan Perdesaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
8	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman
9	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir dan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar hingga usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11	Pelayanan Kesehatan usia lanjut, penderita hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa berat dan terduga tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
13	Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
14	Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
15	Perbaikan gizi masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
16	Pendidikan anak usia dini	Program Pengelolaan Pendidikan
17	Wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun	Program Pengelolaan Pendidikan
18	Pendidikan Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan
19	Peningkatan kualitas layanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
20	Peningkatan dan pengembangan pelayanan perpustakaan	Program Pengelolaan Pendidikan

21	Perluasan jangkauan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
22	Pengembangan data, informasi, & statistic daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
23	Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan petugas tempat ibadah	Program Administrasi Umum
24	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pendidikan untuk pemahaman dan pengamalan nilai-nilai religiusitas	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
25	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan reformasi birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan
26	Pengembangan kompetensi dan profesionalitas ASN	Program Kepegawaian Daerah
27	Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
28	Pengembangan pengendalian dan pengawasan keuangan daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan
29	Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
30	Pengembangan sistem pelaporan kinerja pembangunan daerah	Program Administrasi Umum
31	Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Administratif Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Administrasi Umum
32	Pengembangan inovasi daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
33	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
34	Pelayanan kebencanaan daerah	Program Penanggulangan Bencana
35	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
36	Perlindungan Sosial Masyarakat	Program Rehabilitasi Sosial
37	Peningkatan kualitas hidup perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
38	Peningkatan investasi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
39	Pelayanan perizinan terpadu	Program Pelayanan Penanaman Modal
40	Pembinaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
41	Pengembangan ekonomi lokal unggulan daerah	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
42	Pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM	Program Pengembangan UMKM
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
43	Pengembangan kemitraan dan destinasi wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata
44	Pengembangan teknologi produksi pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

45	Pembinaan dan peningkatan kemandirian pelaku usaha tani	Program Penyuluhan Pertanian
46	Pengembangan kemitraan ekonomi besar, menengah dan kecil	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
47	Pembinaan industri rumah tangga dan pelaku ekonomi kurang mampu	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
48	Peningkatan kemampuan teknologi industri dan penggunaan teknologi tepat guna	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
49	Pengembangan kawasan strategis daerah	Program Pengembangan Permukiman
50	Pengembangan panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
51	Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
52	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
53	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
54	Pengembangan sistem pertanian ramah lingkungan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

2. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari perubahan Rencana Strategis atau RPJM Tahun 2018-2023 disusun suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja yang ada dalam RKPD ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. RKPD merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan administrasi dapat berjalan dengan baik.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Enrekang Tahun 2023 memuat rencana kegiatan yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2023 beserta indikator keberhasilan namun tidak mencantumkan target kinerja/nilai kuantitatif setiap indikator kinerja yang harus dicapai dalam tahun 2023.

Untuk memenuhi Sasaran strategis tahun 2023 maka dirumuskan dalam kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran

jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Program-program strategis yang ditampilkan pada bagian ini merupakan program-program yang secara langsung mendukung pencapaian visi, misi pembangunan daerah.

Adapun sasaran strategis tahun 2023, indikator kinerja dan target kinerja dapat disajikan pada tabel berikut :

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD
MISI I : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik					
1	Meningkatnya aksesibilitas ke pusat-pusat produksi perdesaan	1	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	88
		2	Luas Irigasi dalam Kondisi Baik	Ha	5,219
2	Meningkatnya kualitas utilitas keindahan dan layanan dasar perkotaan	3	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	%	42
		4	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Pemerintah daerah	%	89
		5	Panjang Drainase berfungsi baik	m	303,707
		6	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni	%	100
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	89
		7	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi	RT	30,110
	8	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	KK	37,422	
MISI II : Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral, Beriman dan Bertaqwa					
3	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan	10	Angka kematian IBU per 100.000 kelahiran hidup	Orang	130
			Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup 100.000 kelahiran hidup	Orang	0.4
			Angka kesakitan (morbiditas)	Orang	62.7
			Rasio rumah sakit/Puskesmas/PUSTU/ poliklinik per satuan penduduk	%	0.39

			Persentase rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi	%	100
			Persentase rumah sakit dan puskesmas yang menerapkan sistem informasi yang terintegrasi	%	100
			Cakupan pelayanan pasien di RS	%	100
			Persentase tingkat ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana RS	%	90
			Persentase pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di RS	%	90
			Persentase Pengembangan SDM dan Pengembangan layanan di RS	%	95
		11	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 100.000 kelahiran hidup	%	70
		12	Persentase apotek, toko obat, Optik, Umot dan PIRT yang memiliki izin	%	100
			Persentase TTU, TPM dan damiu yang memenuhi syarat kesehatan	%	86
		13	Angka partisipasi sekolah 5-15 tahun	%	100
4	Meningkatnya akses dan aplikasi teknologi terapan masyarakat	14	Persentase Peningkatan Akses dan aplikasi Teknologi Terapan	%	100
		15	Cakupan OPD yang mengakses data dan informasi daerah yang terintegrasi	%	100
5	Meluasnya penerapan nilai spiritualitas dalam hidup bermasyarakat	16	Persentase petugas tempat ibadah yang dibina	%	100
			Persentase OPD yang dirumuskan dan dikoordinasikan kebijakannya	%	100
		17	Tingkat Capaian Kinerja pada sektor Pemerintahan dan Kesra	%	95
MISI III : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam berbagai Aktivitas Kehidupan Masyarakat tanpa Diskriminasi					
6	Terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	18	Persentase Pengawasan berdasarkan PKPT	%	97.00
		19	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional sesuai kompetensi	%	91.00
			Persentasenya ASN yang berkembang kompetensinya	%	68
			Persentase pemenuhan kebutuhan ASN	%	63
			Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	100

		20	Persentase konsistensi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100
			Tingkat pemenuhan Dokumen Penganggaran keuangan daerah yang tepat waktu dan berkualitas	%	100
			Tingkat Pemenuhan Dokumen Perbendaharaan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	%	100
		21	Tingkat Pemenuhan Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu	%	100
			Tingkat pemenuhan urusan penunjang pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan	%	100
		22	Jumlah inovasi pelayanan publik	Jumlah	11
7	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan sosial	23	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	100
		25	Persentase Penduduk di Kabupaten Enrekang yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	%	100
			Persentase Penduduk di Kab.Enrekang yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	%	100
		26	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	%	100
		27	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial	%	100
8	Terciptanya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	28	Persentase anggaran responsive gender dalam APBD	%	3.50
MISI IV : Meningkatkan Skala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri					
9	Meningkatnya realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	29	Pertumbuhan realisasi investasi daerah (Lokal/PMDN/PMA)	%	1.50
		30	Persentase perijinan yang diterbitkan	%	100
		31	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100
		32	Jumlah produk unggulan daerah di pasar modern	Jumlah	5
		33	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	100

		34	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	100
		35	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	%	20
		36	Persentase peningkatan cakupan Pemasaran pariwisata	%	25
		37	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan	%	100
			Persentase Sarana pengolahan hasil peternakan	%	100
		38	Persentase kelompok tani yang dibina	%	100
10	Menguatnya peran pelaku ekonomi kecil dan menengah serta masyarakat kurang mampu	39	Persentase peningkatan kapasitas usaha UMKM	%	100
		40	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100
11	Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas komoditas unggulan daerah	41	Persentase pelaku IKM yang memanfaatkan teknologi	%	80
		42	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Pemerintah daerah	%	89
12	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian daerah	43	Jumlah Ketersediaan pangan utama(beras, jagung,kedelai), ketersediaan energi, ketersediaan protein	%	81
		44	Jumlah dokumen kerawanan pangan yang dihasilkan	Dok	1
MISI V : Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan					
13	Meluasnya penerapan sistem pertanian organik dan ramah lingkungan	45	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	%	96.08
		46	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	90
		47	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	%	47

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan pemerintahan yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Enrekang menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staregis.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2023, adalah merupakan Pengukuran Kinerja Tahun Empat RPJMD 2018 -2023 yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reuiu dan evaluasi kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut:

Tabel III-1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50%	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

(1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi } ^*)}{\text{Rencana } ^{**})} \times 100\%$$

(2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana } ^{**}) - (\text{Realisasi } ^*) - \text{Rencana } ^{**})}{\text{Rencana } ^{**})} \times 100\%$$

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang sangat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran yang dilaporkan pencapaian pada tahun 2023 berpedoman Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 13 (tiga belas) sasaran yang didukung oleh 47 (empat puluh tujuh) indikator sasaran.

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Enrekang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang melalui Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 990/KEP/XII/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2023 dapat dilihat di table dibawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Enrekang
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2023	Realisasi Thn 2023	Nilai Capaian (%)	Sumber Data
MISI I : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik						
<i>Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas ke pusat-pusat produksi perdesaan</i>						
1	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	88	67.00	76.14	DPU-TR
2	Luas Irigasi dalam Kondisi Baik	Ha	5,219	5,007	95.94	DPU-TR
<i>Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas utilitas keindahan dan layanan dasar perkotaan</i>						
3	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	%	42	41.88	99.71	DLH
4	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Pemerintah daerah	%	89	35.00	39.33	Perkimtan
5	Panjang Drainase berfungsi baik	m	303,707	119,487.00	39.34	DPU-TR
6	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100.00	100.00	Perkimtan
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	89	89.00	100.00	Perkimtan
7	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi	RT	30,110	40,914.00	135.88	DPU-TR
8	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	KK	37,422	50,486.00	134.91	DPU-TR
MISI II : Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral, Beriman dan Bertaqwa						
<i>Sasaran 3 : Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan</i>						
10	Angka kematian IBU per 100.000 kelahiran hidup	Orang	130	144.92	89.70	Dinkes
	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	Orang	0.4	1.09	36.83	Dinkes
	Angka kesakitan (morbidity)	Orang	10.05	7.70	130.52	Dinkes
	Rasio rumah sakit/Puskesmas/PUSTU/poliklinik per satuan penduduk	%	0.39	0.39	100.00	Dinkes
	Persentase rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi	%	100	93.75	93.75	Dinkes

	Persentase rumah sakit dan puskesmas yang menerapkan sistem informasi yang terintegrasi	%	100	100.00	100.00	Dinkes
	Cakupan pelayanan pasien di RS	%	100	100.00	100.00	RSUD Massenrempulu
	Persentase tingkat ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana RS	%	90	90.00	100.00	RSUD Massenrempulu
	Persentase pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di RS	%	90	90.00	100.00	RSUD Massenrempulu
	Persentase Pengembangan SDM dan Pengembangan layanan di RS	%	95	75.00	78.95	RSUD Massenrempulu
11	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 100.000 kelahiran hidup	%	70	63.40	90.57	Dinkes
12	Persentase apotek, toko obat, Optik, Umot dan PIRT yang memiliki izin	%	100	100.00	100.00	Dinkes
	Persentase TTU, TPM dan damiu yang memenuhi syarat kesehatan	%	86	69.31	80.59	Dinkes
13	Angka partisipasi sekolah 5-15 tahun	%	100	94.00	94.00	Disdikbud
Sasaran 4 : Meningkatnya akses dan aplikasi teknologi terapan masyarakat						
14	Persentase Peningkatan Akses dan aplikasi Teknologi Terapan	%	100	100.00	100.00	Diskominfo
15	Cakupan OPD yang mengakses data dan informasi daerah yang terintegrasi	%	100	100.00	100.00	Diskominfo
Sasaran 5 : Meluasnya penerapan nilai spiritualitas dalam hidup bermasyarakat						
16	Persentase hasil Evaluasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Sesuai Standar	%	100	100.00	100.00	Setda
	Persentase OPD yang dirumuskan dan dikoordinasikan kebijakannya	%	100	100.00	100.00	Setda
17	Tingkat Capaian Kinerja pada sektor Pemerintahan dan Kesra	%	95	95.00	100.00	Setda
MISI III : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam berbagai Aktivitas Kehidupan Masyarakat tanpa Diskriminasi						
Sasaran 6 : Terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						
18	Persentase Pengawasan berdasarkan PKPT	%	97	97.00	100.00	Inspektorat

19	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional sesuai kompetensi	%	91	91.00	100.00	BKPSDM
	Persentasenya ASN yang berkembang kompetensinya	%	68	6.00	8.82	BKPSDM
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN	%	63	78.00	123.81	BKPSDM
	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	100	99.00	99.00	BKPSDM
20	Persentase konsistensi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100.00	100.00	Bappeda-Litbangda
	Tingkat pemenuhan Dokumen Penganggaran keuangan daerah yang tepat waktu dan berkualitas	%	100	100.00	100.00	BKAD
	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perbendaharaan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	%	100	100.00	100.00	BKAD
21	Tingkat Pemenuhan Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu	%	100	100.00	100.00	BKAD
	Tingkat pemenuhan urusan penunjang pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan	%	100	100.00	100.00	BKAD
22	Jumlah inovasi pelayanan publik	Jumlah	11	4.00	36.36	Bappeda-Litbangda
<i>Sasaran 7 : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pelindungan sosial</i>						
23	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	100	99.00	99.00	Seluruh Kecamatan
25	Persentase Penduduk di Kabupaten Enrekang yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	%	100	100.00	100.00	BPBD
	Persentase Penduduk di Kab.Enrekang yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	%	100	99.09	99.09	BPBD
26	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	%	100	98.18	98.18	BPBD
27	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial	%	100	100.00	100.00	Dinas Sosial

<i>Sasaran 8 : Terciptanya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan</i>						
28	Persentase anggaran responsive gender dalam APBD	%	3.50	3.50	100.00	DPPA
MISI IV : Meningkatkan Skala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri						
<i>Sasaran 9 : Meningkatnya realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah</i>						
29	Pertumbuhan realisasi investasi daerah (Lokal/PMDN/PMA)	%	1.50	0.16	10.67	DPMPTSP
30	Persentase perijinan yang diterbitkan	%	100	100.00	100.00	DPMPTSP
31	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100	100.00	100.00	DINKOP UKM- Nakertrans
32	Jumlah produk unggulan daerah di pasar modern	Jumlah	5	5.00	100.00	Disperinda g
33	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	100	100.00	100.00	DINKOP UKM- Nakertrans
34	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	100	100.00	100.00	DINKOP UKM- Nakertrans
35	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	%	20	55.00	275.00	Dispopar
36	Persentase peningkatan cakupan Pemasaran pariwisata	%	25	25.00	100.00	Dispopar
37	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan	%	100	100.00	100.00	Disnakin
	Persentase Sarana pengolahan hasil peternakan	%	100	100.00	100.00	Disnakin
38	Persentase kelompok tani yang dibina	%	100	100.00	100.00	DTPHP
<i>Sasaran 10 : Menguatnya peran pelaku ekonomi kecil dan menengah serta masyarakat kurang mampu</i>						
39	Persentase peningkatan kapasitas usaha UMKM	%	100	100.00	100.00	DINKOP UKM- Nakertrans
40	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	97.00	97.00	Dinsos
<i>Sasaran 11 : Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas komoditas unggulan daerah</i>						
41	Persentase pelaku IKM yang memanfaatkan teknologi	%	80	79.00	98.75	Disperinda g/Bappeda- Litbangda

42	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Pemerintah daerah	%	89	35.00	39.33	Bappeda-Litbangda/Dinas Perkim-TR
<i>Sasaran 12 : Terwujudnya ketahanan dan kemandirian daerah</i>						
43	Jumlah Ketersediaan pangan utama(beras, jagung,kedelai), ketersediaan energi, ketersediaan protein	persen	81.00	99.00	122.22	Diskepan
44	Jumlah dokumen kerawanan pangan yang dihasilkan	Dok	1.00	1.00	100.00	Diskepan
MISI V : Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan						
<i>Sasaran 13 : Meluasnya penerapan sistem pertanian organik dan ramah lingkungan</i>						
45	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	%	96.08	96.08	100.00	DLH
46	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	90.00	66.60	74.00	DLH
47	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	%	47.00	47.00	100.00	DTPHP
Rata-Rata Capaian Misi					93.81	

Menggunakan data tahun 2023 hasil olahan

1.2 Perbandingan Capaian Kinerja

1.2.1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.2.1
Realisasi Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Interpretasi
MISI I : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik						
<i>Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas ke pusat-pusat produksi perdesaan</i>						
1	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	88.00	67.00	76.14	Tinggi
2	Luas Irigasi dalam Kondisi Baik	Ha	5,219.00	5,007.00	95.94	Sangat Tinggi
<i>Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas utilitas keindahan dan layanan dasar perkotaan</i>						
3	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	%	42.00	41.88	99.71	Sangat Tinggi

4	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Pemerintah daerah	%	89.00	35.00	39.33	Sangat Rendah
5	Panjang Drainase berfungsi baik	m	303,707.00	119,487.00	39.34	Sangat Rendah
6	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	89.00	89.00	100.00	Sangat Tinggi
7	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi	RT	30,110.00	40,914.00	135.88	Sangat Tinggi
8	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	KK	37,422.00	50,486.00	134.91	Sangat Tinggi
MISI II : Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral, Beriman dan Bertakwa						
<i>Sasaran 3 : Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan</i>						
10	Angka kematian IBU per100.000 kelahiran hidup	Orang	130.00	144.92	89.70	Tinggi
	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup 100.000 kelahiran hidup	Orang	0.40	1.09	36.83	Sangat Rendah
	Angka kesakitan (morbiditas)	Orang	10.05	7.70	130.52	Sangat Tinggi
	Rasio rumah sakit/Puskesmas/PUSTU/ poliklinik per satuan penduduk	%	0.39	0.39	100.00	Sangat Tinggi
	Persentase rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi	%	100.00	93.75	93.75	Sangat Tinggi
	Persentase rumah sakit dan puskesmas yang menerapkan sistem informasi yang terintergrasi	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
	Cakupan pelayanan pasien di RS	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
	Persentase tingkat ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana RS	%	90.00	90.00	100.00	Sangat Tinggi
	Persentase pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di RS	%	90.00	90.00	100.00	Sangat Tinggi

11	Persentase Pengembangan SDM dan Pengembangan layanan di RS	%	95.00	75.00	78.95	Tinggi
	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 100.000 kelahiran hidup	%	70.00	63.40	90.57	Tinggi
12	Persentase apotek, toko obat, Optik, Umat dan PIRT yang memiliki izin	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
	Persentase TTU, TPM dan damiu yang memenuhi syarat kesehatan	%	86.00	69.31	80.59	Tinggi
13	Angka partisipasi sekolah 5-15 tahun	%	100.00	94.00	94.00	Sangat Tinggi
Sasaran 4 : Meningkatnya akses dan aplikasi teknologi terapan masyarakat						
14	Persentase Peningkatan Akses dan aplikasi Teknologi Terapan	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
15	Cakupan OPD yang mengakses data dan informasi daerah yang terintegrasi	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
Sasaran 5 : Meluasnya penerapan nilai spiritualitas dalam hidup bermasyarakat						
16	Persentase petugas tempat ibadah yang dibina	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
	Persentase OPD yang dirumuskan dan dikoordinasikan kebijakannya	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
17	Tingkat Capaian Kinerja pada sektor Pemerintahan dan Kesra	%	95.00	95.00	100.00	Sangat Tinggi
MISI III : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam berbagai Aktivitas Kehidupan Masyarakat tanpa Diskriminasi						
Sasaran 6 : Terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						
18	Persentase Pengawasan berdasarkan PKPT	%	97.00	97.00	100.00	Sangat Tinggi
19	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional sesuai kompetensi	%	91.00	91.00	100.00	Sangat Tinggi
	Persentasenya ASN yang berkembang kompetensinya	%	68.00	6.00	8.82	Sangat Rendah
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN	%	63.00	78.00	123.81	Sangat Tinggi
	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	100.00	99.00	99.00	Sangat Tinggi
20	Persentase konsistensi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi

	Tingkat pemenuhan Dokumen Penganggaran keuangan daerah yang tepat waktu dan berkualitas	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perbendaharaan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
21	Tingkat Pemenuhan Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
	Tingkat pemenuhan urusan penunjang pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
22	Jumlah inovasi pelayanan publik		11.00	4.00	36.36	Sangat Rendah
Sasaran 7 : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan sosial						
23	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	100.00	99.00	99.00	Sangat Tinggi
25	Persentase Penduduk di Kabupaten Enrekang yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
	Persentase Penduduk di Kab.Enrekang yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	%	100.00	99.09	99.09	Sangat Tinggi
26	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	%	100.00	98.18	98.18	Sangat Tinggi
27	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
Sasaran 8 : Terciptanya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan						
28	Persentase anggaran responsive gender dalam APBD	%	3.50	3.50	100.00	Sangat Tinggi
MISI IV : Meningkatkan Skala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri						
Sasaran 9 : Meningkatnya realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah						
29	Pertumbuhan realisasi investasi daerah (Lokal/PMDN/PMA)	%	1.50	2.43	162.00	Sangat Rendah

30	Persentase perijinan yang diterbitkan	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
31	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
32	Jumlah produk unggulan daerah di pasar modern	Jumlah	5.00	5.00	100.00	Sangat Tinggi
33	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
34	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
35	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	%	20.00	55.00	275.00	Sangat Tinggi
36	Persentase peningkatan cakupan Pemasaran pariwisata	%	25.00	25.00	100.00	Sangat Tinggi
37	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
	Persentase Sarana pengolahan hasil peternakan	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
38	Persentase kelompok tani yang dibina	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
<i>Sasaran 10 : Menkuatnya peran pelaku ekonomi kecil dan menengah serta masyarakat kurang mampu</i>						
39	Persentase peningkatan kapasitas usaha UMKM	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
40	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100.00	97.00	97.00	Sangat Tinggi
<i>Sasaran 11 : Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas komoditas unggulan daerah</i>						
41	Persentase pelaku IKM yang memanfaatkan teknologi	%	80.00	79.00	98.75	Sangat Tinggi
42	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Pemerintah daerah	%	89.00	35.00	39.33	Sangat Rendah
<i>Sasaran 12 : Terwujudnya ketahanan dan kemandirian daerah</i>						
43	Jumlah Ketersediaan pangan utama(beras, jagung, kedelai), ketersediaan energi, ketersediaan protein	%	81.00	99.00	122.22	Sangat Tinggi
44	Jumlah dokumen kerawana pangan yang dihasilkan	Dok	1.00	1.00	100.00	Sangat Tinggi
MISI V : Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan						

Sasaran 13 : Meluasnya penerapan sistem pertanian organik dan ramah lingkungan Negara						
45	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	%	96.08	96.08	100.00	Sangat Tinggi
46	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	90.00	66.60	74.00	Sedang
47	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan bencana	%	47.00	47.00	100.00	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Misi					93.81	

Menggunakan Data Tahun 2023 hasil olahan

Berdasarkan data Tabel 1.2.1 terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2023 adalah 93.81 dengan kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut didukung oleh 52 (lima puluh dua) indikator yang realisasinya berkategori sangat tinggi yaitu: Luas Irigasi dalam Kondisi Baik, Persentase Timbulan sampah yang ditangani, Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni+ Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni, Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi, Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum, Angka kesakitan (morbiditas), Rasio rumah sakit/Puskesmas/PUSTU/ poliklinik per satuan penduduk, Persentase rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi, Persentase rumah sakit dan puskesmas yang menerapkan sistem informasi yang terintegrasi, Cakupan pelayanan pasien di RS, Persentase tingkat ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana RS, Persentase pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di RS, Persentase apotek, toko obat, Optik, Umat dan PIRT yang memiliki izin, Angka partisipasi sekolah 5-15 tahun Persentase Peningkatan Akses dan aplikasi Teknologi Terapan, Cakupan OPD yang mengakses data dan informasi daerah yang terintegrasi, Persentase petugas tempat ibadah yang dibina+ Persentase OPD yang dirumuskan dan dikoordinasikan kebijakannya, Tingkat Capaian Kinerja pada sektor Pemerintahan dan Kesra, Persentase Pengawasan berdasarkan PKPT, Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional sesuai kompetensi, Persentase pemenuhan kebutuhan ASN, Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik, Persentase konsistensi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Tingkat pemenuhan Dokumen Penganggaran keuangan daerah yang tepat waktu dan berkualitas, Tingkat Pemenuhan Dokumen Perbendaharaan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu, Tingkat Pemenuhan Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu+ Tingkat pemenuhan urusan penunjang pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan,

Jumlah inovasi pelayanan public, Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan, Persentase Penduduk di Kabupaten Enrekang yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten+ Persentase Penduduk di Kab.Enrekang yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten, Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran, Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi social, Persentase anggaran responsive gender dalam APBD, Persentase perijinan yang diterbitkan, Persentase lulusan bersertifikat pelatihan, Jumlah produk unggulan daerah di pasar modern, Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro, Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten, Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata, Persentase peningkatan cakupan Pemasaran pariwisata, Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan + Persentase Sarana pengolahan hasil peternakan, Persentase kelompok tani yang dibina, Persentase peningkatan kapasitas usaha UMKM, Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan social, Persentase pelaku IKM yang memanfaatkan teknologi, Jumlah Ketersediaan pangan utama(beras, jagung,kedelai), ketersediaan energi, ketersediaan protein, Jumlah dokumen kerawana pangan yang dihasilkan, Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara, Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan bencana.

Untuk indikator yang realisasinya tinggi ada 5 (lima) yaitu: Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik, Angka kematian IBU per100.000 kelahiran hidup, Persentase Pengembangan SDM dan Pengembangan layanan di RS, Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 100.000 kelahiran hidup, Persentase TTU, TPM dan damiu yang memenuhi syarat Kesehatan.

Untuk indikator yang realisasinya sedang ada 1 (satu) yaitu: Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup.

Untuk indikator yang realisasinya sangat rendah ada 7 (tujuh) yaitu: Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Pemerintah daerah, Panjang Drainase berfungsi baik, Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup 100.000 kelahiran hidup, Persentasenya ASN yang berkembang kompetensinya, Jumlah inovasi pelayanan publik, Pertumbuhan realisasi investasi daerah (Lokal/PMDN/PMA), Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Pemerintah daerah.

1.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Tahun 2022 – 2023 dan Capaian Akhir Terhadap RPJMD Akhir Tahun 2023.

Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Enrekang (Kondisi Kinerja Awal RPJMD Perubahan), 2022 dan 2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, Tahun 2023 dan Capaian Terhadap RPJMD Akhir Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target Akhir RPJMD Th 2023	Capaian 2023 thd Akhir RPJMD
		Satuan	2022	2023		
MISI I : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik						
<i>Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas ke pusat-pusat produksi perdesaan</i>						
1	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	66.24	67.00	88.00	76.14
2	Luas Irigasi dalam Kondisi Baik	Ha	4,977	5,007.00	5,219.00	95.94
<i>Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas utilitas keindahan dan layanan dasar perkotaan</i>						
3	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	%	95.39	41.88	42.00	99.71
4	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Pemerintah daerah	%	85.00	35.00	91.00	38.46
5	Panjang Drainase berfungsi baik	m	104,227.00	119,487.00	900,144.00	13.27
6	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni	%	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	-	89.00	91.00	97.80
7	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi	RT	40,914.00	40,914.00	30,110.00	135.88
8	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	KK	50,449.00	50,486.00	37,422.00	134.91
MISI II : Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral, Beriman dan Bertaqwa						
<i>Sasaran 3 : Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan</i>						
10	Angka kematian IBU per 100.000 kelahiran hidup	Orang	137.17	144.92	130.00	111.48

	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup 100.000 kelahiran hidup	Orang	0.34	1.09	0.40	271.50
	Angka kesakitan (morbiditas)	Orang	61.40	7.70	62.70	12.28
	Rasio rumah sakit/Puskesmas/PUSTU/ poliklinik per satuan penduduk	%	0.38	0.39	0.39	100.00
	Persentase rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi	%	87.50	93.75	100.00	93.75
	Persentase rumah sakit dan puskesmas yang menerapkan sistem informasi yang terintegrasi	%	92.86	100.00	100.00	100.00
	Cakupan pelayanan pasien di RS	%	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase tingkat ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana RS	%	85.00	90.00	90.00	100.00
	Persentase pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di RS	%	85.00	90.00	90.00	100.00
	Persentase Pengembangan SDM dan Pengembangan layanan di RS	%	90.00	75.00	95.00	78.95
11	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 100.000 kelahiran hidup	%	63.00	63.40	70.00	90.57
12	Persentase apotek, toko obat, Optik, Umat dan PIRT yang memiliki izin	%	99.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase TTU, TPM dan damiu yang memenuhi syarat kesehatan	%	88.46	69.31	89.00	77.88
13	Angka partisipasi sekolah 5-15 tahun	%	98.07	94.00	100.00	94.00
<i>Sasaran 4 : Meningkatnya akses dan aplikasi teknologi terapan masyarakat</i>						
14	Persentase Peningkatan Akses dan aplikasi Teknologi Terapan	%	95.65	100.00	100.00	100.00
15	Cakupan OPD yang mengakses data dan informasi daerah yang terintegrasi	%	74.42	100.00	100.00	100.00
<i>Sasaran 5 : Meluasnya penerapan nilai spiritualitas dalam hidup bermasyarakat</i>						
16	Persentase petugas tempat ibadah yang dibina	%	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase OPD yang dirumuskan dan dikoordinasikan kebijakannya	%	100.00	100.00	100.00	100.00

17	Tingkat Capaian Kinerja pada sektor Pemerintahan dan Kesra	%	100.00	95.00	95.00	100.00
MISI III : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam berbagai Aktivitas Kehidupan Masyarakat tanpa Diskriminasi						
<i>Sasaran 6 : Terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas</i>						
18	Persentase Pengawasan berdasarkan PKPT	%	100.00	97.00	97.00	100.00
19	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional sesuai kompetensi	%	98.57	91.00	91.00	100.00
	Persentasenya ASN yang berkembang kompetensinya	%	8.79	6.00	68.00	8.82
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN	%	87.26	78.00	63.00	123.81
	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	99.87	99.00	100.00	99.00
20	Persentase konsistensi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00
	Tingkat pemenuhan Dokumen Penganggaran keuangan daerah yang tepat waktu dan berkualitas	%	90.00	100.00	100.00	100.00
	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perbendaharaan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	%	95.00	100.00	100.00	100.00
21	Tingkat Pemenuhan Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu	%	95.00	100.00	100.00	100.00
	Tingkat pemenuhan urusan penunjang pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan	%	95.00	100.00	100.00	100.00
22	Jumlah inovasi pelayanan publik	Jumlah	4.00	4.00	11.00	36.36
<i>Sasaran 7 : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan sosial</i>						
23	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	95.00	99.00	100.00	99.00
25	Persentase Penduduk di Kabupaten Enrekang yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	%	100.00	100.00	100.00	100.00

	Persentase Penduduk di Kab.Enrekang yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	%	100.00	99.09	100.00	99.09
26	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	%	100.00	98.18	100.00	98.18
27	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial	%	100.00	100.00	100.00	100.00
<i>Sasaran 8 : Terciptanya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan</i>						
28	Persentase anggaran responsive gender dalam APBD	%	3.68	3.50	4.00	87.50
MISI IV : Meningkatkan Skala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri						
<i>Sasaran 9 : Meningkatnya realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah</i>						
29	Pertumbuhan realisasi investasi daerah (Lokal/PMDN/PMA)	%	0.05	0.16	1.50	10.67
30	Persentase perijinan yang diterbitkan	%	100.00	100.00	100.00	100.00
31	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100.00	100.00	100.00	100.00
32	Jumlah produk unggulan daerah di pasar modern	Produk	4.00	5.00	5.00	100.00
33	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	100.00	100.00	100.00	100.00
34	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	100.00	100.00	100.00	100.00
35	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	%	15.00	55.00	20.00	275.00
36	Persentase peningkatan cakupan Pemasaran pariwisata	%	20.00	25.00	25.00	100.00
37	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan	%	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase Sarana pengolahan hasil peternakan	%	100.00	100.00	100.00	100.00
38	Persentase kelompok tani yang dibina	%	60.00	100.00	100.00	100.00
<i>Sasaran 10 : Menkuatnya peran pelaku ekonomi kecil dan menengah serta masyarakat kurang mampu</i>						

39	Persentase peningkatan kapasitas usaha UMKM	%	100.00	100.00	100.00	100.00
40	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100.00	97.00	100.00	97.00
<i>Sasaran 11 : Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas komoditas unggulan daerah</i>						
41	Persentase pelaku IKM yang memanfaatkan teknologi	%	65.77	79.00	80.00	98.75
42	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Pemerintah daerah	%	85.00	35.00	91.00	38.46
<i>Sasaran 12 : Terwujudnya ketahanan dan kemandirian daerah</i>						
43	Jumlah Ketersediaan pangan utama(beras, jagung,kedelai), ketersediaan energi, ketersediaan protein	%	85.00	99.00	91.00	108.79
44	Jumlah dokumen kerawanan pangan yang dihasilkan	Dok	1.00	1.00	3.00	33.33
MISI V : Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan						
<i>Sasaran 13 : Meluasnya penerapan sistem pertanian organik dan ramah lingkungan</i>						
45	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	%	94.67	96.08	94.00	102.21
46	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	87.00	66.60	90.00	74.00
47	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan bencana	%	30.00	47.00	47.00	100.00
Rata-Rata Capaian Misi						94.23

Menggunakan Data Tahun 2023 hasil olahan

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja indikator terhadap target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023, rata-rata capaian kinerja tahun 2023 mencapai **94.23 %** dengan kategori sangat tinggi. Terdapat 8(delapan) indikator kinerja sudah mencapai atau melebihi target akhir RPJMD yaitu: Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi, Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum, Angka kematian IBU per 100.000 kelahiran hidup, Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup 100.000 kelahiran hidup, Persentase pemenuhan kebutuhan ASN, Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata, Jumlah Ketersediaan pangan utama(beras, jagung,kedelai), ketersediaan energi, ketersediaan protein, Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara.

1.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2022

Berikut adalah perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Enrekang selama 2 tahun terakhir terhadap Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD

Tabel 1.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Percepatan (Perlambatan)
			2022	2023	
MISI I : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik					
<i>Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas ke pusat-pusat produksi perdesaan</i>					
1	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	77.66	76.14	-1.52
2	Luas Irigasi dalam Kondisi Baik	Ha	97.01	95.94	-1.07
<i>Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas utilitas keindahan dan layanan dasar perkotaan</i>					
3	Persentase Timbunan sampah yang ditangani	%	238.48	99.71	-138.77
4	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Pemerintah daerah	%	97.70	39.33	-58.37
5	Panjang Drainase berfungsi baik	m	34.74	39.34	4.60
6	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni	%	100.00	100.00	0.00
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	-	100.00	100.00
7	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi	RT	137.85	135.88	-1.97
8	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	KK	137.98	134.91	-3.07
MISI II : Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral, Beriman dan Bertaqwa					
<i>Sasaran 3 : Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan</i>					
10	Angka kematian IBU per 100.000 kelahiran hidup	Orang	97.98	89.70	-8.28
	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup 100.000 kelahiran hidup	Orang	68.00	36.83	-31.17
	Angka kesakitan (morbiditas)	Orang	99.19	130.52	31.33
	Rasio rumah sakit/Puskesmas/PUSTU/ poliklinik per satuan penduduk	%	102.70	100.00	-2.70
	Persentase rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi	%	93.33	93.75	0.42

	Persentase rumah sakit dan puskesmas yang menerapkan sistem informasi yang terintegrasi	%	92.86	100.00	7.14
	Cakupan pelayanan pasien di RS	%	100.00	100.00	0.00
	Persentase tingkat ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana RS	%	100.00	100.00	0.00
	Persentase pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di RS	%	96.59	100.00	3.41
	Persentase Pengembangan SDM dan Pengembangan layanan di RS	%	100.00	78.95	-21.05
11	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 100.000 kelahiran hidup	%	94.17	90.57	-3.60
12	Persentase apotek, toko obat, Optikal, Umot dan PIRT yang memiliki izin	%	100.00	100.00	0.00
	Persentase TTU, TPM dan damiu yang memenuhi syarat kesehatan	%	104.07	80.59	-23.48
13	Angka partisipasi sekolah 5-15 tahun	%	98.07	94.00	-4.07
<i>Sasaran 4 : Meningkatnya akses dan aplikasi teknologi terapan masyarakat</i>					
14	Persentase Peningkatan Akses dan aplikasi Teknologi Terapan	%	103.97	100.00	-3.97
15	Cakupan OPD yang mengakses data dan informasi daerah yang terintegrasi	%	78.34	100.00	21.66
<i>Sasaran 5 : Meluasnya penerapan nilai spiritualitas dalam hidup bermasyarakat</i>					
16	Persentase petugas tempat ibadah yang dibina	%	100.00	100.00	0.00
	Persentase OPD yang dirumuskan dan dikoordinasikan kebijakannya	%	100.00	100.00	0.00
17	Tingkat Capaian Kinerja pada sektor Pemerintahan dan Kesra	%	105.26	100.00	-5.26
MISI III : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam berbagai Aktivitas Kehidupan Masyarakat tanpa Diskriminasi					
<i>Sasaran 6 : Terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas</i>					
18	Persentase Pengawasan berdasarkan PKPT	%	104.17	100.00	-4.17
19	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional sesuai kompetensi	%	112.01	100.00	-12.01
	Persentasenya ASN yang berkembang kompetensinya	%	13.95	8.82	-5.13
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN	%	145.43	123.81	-21.62
	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	99.87	99.00	-0.87
20	Persentase konsistensi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100.00	100.00	0.00

	Tingkat pemenuhan Dokumen Penganggaran keuangan daerah yang tepat waktu dan berkualitas	%	90.00	100.00	10.00
	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perbendaharaan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	%	95.00	100.00	5.00
21	Tingkat Pemenuhan Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu	%	95.00	100.00	5.00
	Tingkat pemenuhan urusan penunjang pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan	%	95.00	100.00	5.00
22	Jumlah inovasi pelayanan publik	Jumlah	44.44	36.36	-8.08
Sasaran 7 : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan sosial					
23	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	98.96	99.00	0.04
25	Persentase Penduduk di Kabupaten Enrekang yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	%	100.00	100.00	0.00
	Persentase Penduduk di Kab.Enrekang yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	%	100.00	99.09	-0.91
26	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	%	100.00	98.18	-1.82
27	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial	%	100.00	100.00	0.00
Sasaran 8 : Terciptanya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan					
28	Persentase anggaran responsive gender dalam APBD	%	105.14	100.00	-5.14
MISI IV : Meningkatkan Skala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri					
Sasaran 9 : Meningkatnya realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah					
29	Pertumbuhan realisasi investasi daerah (Lokal/PMDN/PMA)	%	3.33	10.67	7.34
30	Persentase perijinan yang diterbitkan	%	100.00	100.00	0.00
31	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100.00	100.00	0.00
32	Jumlah produk unggulan daerah di pasar modern	Jumlah	100.00	100.00	0.00
33	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	100.00	100.00	0.00
34	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	100.00	100.00	0.00
35	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	%	100.00	275.00	175.00

36	Persentase peningkatan cakupan Pemasaran pariwisata	%	100.00	100.00	0.00
37	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan	%	60.00	100.00	40.00
	Persentase Sarana pengolahan hasil peternakan	%	100.00	100.00	0.00
38	Persentase kelompok tani yang dibina	%	100.00	100.00	0.00
<i>Sasaran 10 : Menguatnya peran pelaku ekonomi kecil dan menengah serta masyarakat kurang mampu</i>					
39	Persentase peningkatan kapasitas usaha UMKM	%	100.00	100.00	0.00
40	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100.00	97.00	-3.00
<i>Sasaran 11 : Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas komoditas unggulan daerah</i>					
41	Persentase pelaku IKM yang memanfaatkan teknologi	%	93.96	98.75	4.79
42	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Pemerintah daerah	%	97.70	39.33	-58.37
<i>Sasaran 12 : Terwujudnya ketahanan dan kemandirian daerah</i>					
43	Jumlah Ketersediaan pangan utama(beras, jagung,kedelai), ketersediaan energi, ketersediaan protein	%	99.00	122.22	23.22
44	Jumlah dokumen kerawana pangan yang dihasilkan	Dok	100.00	100.00	0.00
MISI V : Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan					
<i>Sasaran 13 : Meluasnya penerapan sistem pertanian organik dan ramah lingkungan Negara</i>					
45	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	%	99.65	100.00	0.35
46	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100.00	74.00	-26.00
47	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan bencana	%	76.92	100.00	23.08

Menggunakan Data Tahun 2023 hasil olahan

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan 2023 terdapat 47 (empat puluh tujuh) indikator kinerja utama, diperoleh percepatan dan perlambatan.

1.3 Analisis/Penjelasan Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk setiap sasaran strategis disesuaikan dengan pengukuran kinerja, untuk setiap indikator kinerja sasaran dilakukan analisis/penjelasan capaian kinerja sesuai dengan Misi yang di tetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018 -2023.

1.	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infra Struktur Pelayanan Publik
-----------	---

Untuk mengetahui secara jelas capaian kinerja dari masing-masing indikator Sasaran PERTAMA Yaitu Menciptakan pembangunan yang merata bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan.

Secara umum target indikator sasaran PERTAMA telah tercapai dengan Rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran mencapai **91,25%** dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian target masing-masing Indikator Kinerja yang didukung oleh Program Prioritas Perangkat Daerah, antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Jalan;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;
4. Program Kawasan Permukiman;
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
6. Program Pengembangan Perumahan;
7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
8. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Leading sector pada sasaran PERTAMA ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan. Program tersebut diatas terlaksana dengan dukungan terealisasinya kegiatan-kegiatan di tahun 2023 yang pada akhirnya mendukung pencapaian Sasaran PERTAMA.

2.	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral, Beriman dan Bertaqwa
-----------	---

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing dan berkarakter religius. Secara umum target indikator sasaran KEDUA telah tercapai dengan Rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran mencapai **94,42%** dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian target masing-masing Indikator Kinerja yang didukung oleh Program Prioritas Perangkat Daerah, antara lain:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
4. Program Pengelolaan Pendidikan;

5. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
6. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
7. Program Administrasi Umum;
8. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

Leading sector pada sasaran KEDUA ini adalah Dinas Kesehatan, RSU Massenrempulu, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Sekretariat Daerah. Program tersebut diatas terlaksana dengan dukungan terealisasinya kegiatan-kegiatan di tahun 2023 yang pada akhirnya mendukung pencapaian Sasaran KEDUA.

3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan Rasa Aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi.

Target dan Capaian indikator keberhasilan Sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik,

Secara umum target indikator sasaran KETIGA telah tercapai dengan Rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran mencapai **92,02%** dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Leading sector pada sasaran KETIGA ini adalah: Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan dan Asset Daerah, Seluruh Kecamatan, Dinas Sosial, Satpol PP Damkar dan DPP-PA,

Untuk mencapai target indikator kinerja Sasaran KETIGA tersebut diatas, telah dilaksanakan berbagai macam Program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Program Kepegawaian Daerah;
3. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
6. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
7. Program Penanggulangan Bencana;
8. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran;
9. Program Rehabilitasi Sosial;
10. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.

Program tersebut diatas terlaksana dengan dukungan terealisasinya kegiatan-kegiatan di tahun 2023 yang pada akhirnya mendukung pencapaian sasaran KETIGA

4.	Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Skala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri
-----------	---

Target beserta keberhasilan capaian Indikator Sasaran Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang akseleratif dan inklusif.

Secara umum target indikator sasaran KEEMPAT telah tercapai dengan Rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran mencapai **102,53%** dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Leading sector pada sasaran EMPAT ini adalah pada Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perekebunan, Dispopar, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Bappeda & Litbang.

Pemerintah Kabupaten Enrekang pada tahun 2023 untuk mencapai sasaran berkembangnya perekonomian daerah yang berbasis masyarakat yang diikuti dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat didukung dengan dilaksanakannya Program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Program Pelayanan Penanaman Modal;
3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
5. Program Pengembangan UMKM;
6. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
7. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
8. Program Pemasaran Pariwisata;
9. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
10. Program Penyuluhan Pertanian;
11. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
12. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
13. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
14. Program Pengembangan Permukiman;
15. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
16. Program Penanganan Kerawanan Pangan.

Program tersebut diatas terlaksana dengan dukungan terealisasinya kegiatan-kegiatan di tahun 2023 yang pada akhirnya mendukung pencapaian sasaran KEEMPAT

5.	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal yang Berwawasan Lingkungan
-----------	---

Target dan capaian indikator Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan memperhatikan aspek lingkungan, secara umum tingkat capaian kinerja sasaran ini termasuk kategori **Sangat Tinggi** dengan tingkat capaian rata-rata **91,33%**.

Leading sector pada sasaran LIMA ini adalah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Enrekang pada tahun 2023 untuk mencapai Peningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal yang Berwawasan Lingkungan, maka Program Prioritas Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

Program tersebut diatas terlaksana dengan dukungan terealisasinya kegiatan-kegiatan di tahun 2023 yang pada akhirnya mendukung pencapaian sasaran KELIMA

1.4 Strategi Pemegahan Masalah

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja di masa mendatang yakni pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Enrekang telah menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Enrekang, Tahun 2021-2023 dengan beberapa strategi pemecahan masalah sebagai berikut:

- a. Memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dari pusat kota ke pusat-pusat produksi yang ada di perdesaan;
- b. Meningkatkan kebersihan dan keindahan serta kualitas sarana dan prasarana layanan dasar serta penataan ruang publik perkotaan;
- c. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana penunjang layanan kesehatan dan pendidikan dengan melihat pada aspek pemerataan secara proporsional di setiap wilayah;
- d. Mengembangkan jaringan teknologi informasi serta pembinaan literasi masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi dalam mendukung setiap aktivitasnya;

- e. Mengembangkan sarana dan prasarana ibadah serta mendorong peningkatan aktivitas lembaga-lembaga keagamaan dalam berperan memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama;
- f. Mendorong penguatan tata kelola dan profesionalisme aparatur yang didukung oleh sistem teknologi informasi yang relevan, akuntabel, dan mendukung inovasi secara berkelanjutan;
- g. Memperkuat peran dan partisipasi masyarakat dalam perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- h. Memastikan adanya aspek pengarusutamaan gender dan masyarakat berkebutuhan khusus dalam setiap proses pembangunan daerah;
- i. Membangun iklim investasi yang kondusif serta berperan aktif dalam setiap upaya mendatangkan investor khususnya pada sektor unggulan daerah;
- j. Meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM dan masyarakat kurang mampu melalui pembinaan dan pelibatan langsung pada aktivitas penciptaan nilai tambah komoditas unggulan daerah;
- k. Mendorong kemandirian dan ketahanan pangan melalui pengembangan keanekaragaman pangan lokal berbasis masyarakat;
- l. Mendorong kelompok tani dalam melakukan peralihan secara penuh terhadap sistem pertanian organik dan ramah lingkungan melalui dukungan yang riil.

2. REALISASI ANGGARAN KEUANGAN

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2023 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2023 yang secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pendapatan diuraikan menurut sumber-sumber perolehan dana, Belanja diuraikan menurut penggunaan dana, sedangkan pembiayaan diuraikan menurut penerimaan dan pengeluaran daerah. Garis besar APBD Tahun 2023 dan realisasinya.

2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SELISIH
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	176,262,839,970.00	102,357,695,188.18	58.07	73,905,144,781.82
2	PENDAPATAN TRANSFER	1,000,809,098,569.00	977,184,129,416.00	97.80	23,624,969,153.00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	0.00	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1,249,191,785,079.00	1,067,524,025,260.48	85.46	181,667,759,818.52
1	BELANJA OPERASIONAL	821,099,686,148.00	733,712,141,186.00	89.36	87,387,544,962.00
2	BELANJA MODAL	278,058,096,826.00	177,064,532,546.00	63.68	100,993,564,280.00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,000,000,000.00	168,302,500.00	16.83	831,697,500.00
4	BELANJA TRANSFER	152,269,628,199.00	150,605,993,507.00	98.91	1,663,634,692.00
	JUMLAH BELANJA	1,252,427,411,173.00	1,061,550,969,739.00	84.76	190,876,441,434.00
	SURPLUS / DEFISIT	-3,235,626,094.00	5,973,055,521.48	(184.60)	
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65,592,789,406.00	65,492,789,406.00	99.85	100,000,000.00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	62,357,163,312.00	62,357,163,312.00	100.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	3,235,626,094.00	3,135,626,094.00		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	9,108,681,615.48		

Sumber Data : Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Tahun 2023

1.2 Belanja daerah Tahun 2023

Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp. 1,252,427,411,173.00**. Dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar **Rp. 1,061,550,969,739.00** atau capaian sebesar **84,76 %**. Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk Belanja Operasional **Rp. 821,099,686,148.00** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 733,712,141,186.00**. Belanja Modal **Rp. 278,058,096,826.00** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 177,064,532,546.00**. Belanja Tak Terduga **Rp. 1,000,000,000.00** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 168,302,500.00**. Belanja Transfer **Rp. 152,269,628,199.00** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 150,605,993,507.00** Rincian Rencana dan Realisasi Belanja Daerah berikut ini:

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SELISIH
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	176,262,839,970.00	102,357,695,188.18	58.07	73,905,144,781.82
1	Pajak Daerah	14,752,533,553.00	16,231,913,936.18	110.03	(1,479,380,383.18)
	Pajak Hotel	19,570,100.00	17,981,000.00	91.88	1,589,100.00
	Pajak Restoran	1,180,333,714.00	1,383,225,213.00	117.19	(202,891,499.00)
	Pajak Hiburan	12,000,000.00	7,942,500.00	66.19	4,057,500.00
	Pajak Reklame	426,554,890.00	354,899,870.00	83.20	71,655,020.00
	Pajak Penerangan Jalan	6,186,607,032.00	6,835,841,385.00	110.49	(649,234,353.00)
	Pajak Parkir	4,050,000.00	3,300,000.00	81.48	750,000.00
	Pajak Sarang Burung Walet	3,300,000.00	0	-	3,300,000.00
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,567,312,000.00	1,172,387,639.00	74.80	394,924,361.00
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4,552,329,475.00	3,107,999,863.00	68.27	1,444,329,612.00
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1,218,967,236.00	1,510,370,087.70	123.91	(291,402,851.70)
2	Retribusi Daerah	7,823,970,843.00	7,952,169,253.00	101.64	(128,198,410.00)
	Retribusi Jasa Umum	6,045,884,000.00	6,427,790,497.00	106.32	(381,906,497.00)
	Retribusi Jasa Usaha	1,536,507,250.00	1,287,906,500.00	83.82	248,600,750.00
	Retribusi Perizinan Tertentu	241,579,593.00	236,472,256.00	97.89	5,107,337.00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18,896,115,974.00	13,407,363,620.00	70.95	5,488,752,354.00
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	18,896,115,974.00	13,407,363,620.00	70.95	5,488,752,354.00
4	Lain-lain PAD yang Sah	206,491,575,246.00	54,586,415,413.78	26.44	151,905,159,832.22
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	149,062,404,254.00	262,555,242.00	0.18	148,799,849,012.00

	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	84,000,000.00	36,000,000.00	42.86	48,000,000.00
	Jasa Giro	887,467,888.00	1,326,868,419.00	149.51	(439,400,531.00)
	Pendapatan Bunga	1,026,301,369.00	27,646,565.52	2.69	998,654,803.48
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3,262,183,518.00	1,902,451,349.18	58.32	1,359,732,168.82
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	901,334,865.00	137,266,199.14	15.23	764,068,665.86
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	50,000,000.00	6,214,466.00	12.43	43,785,534.00
	Pendapatan dari Pengembalian	1,069,330,706.00	195,517,376.00	18.28	873,813,330.00
	Pendapatan BLUD	32,000,000,000.00	37,504,327,518.94	117.20	(5,504,327,518.94)
	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	3,940,747,266.00	0.00	-	3,940,747,266.00
	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	14,207,805,380.00	13,187,568,278.00	92.82	1,020,237,102.00
2	PENDAPATAN TRANSFER	1,000,809,098,569.00	977,184,129,416.00	97.80	23,624,969,153.00
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	930,610,020,000.00	906,948,324,427.00	97.46	23,661,695,573.00
	Dana Perimbangan	818,060,712,000.00	802,211,886,927.00	98.06	15,848,825,073.00
	Dana Insentif Daerah (DID)	15,625,741,000.00	7,812,870,500.00	50.00	7,812,870,500.00
	Dana Desa	96,923,567,000.00	96,923,567,000.00	100.00	-
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70,199,078,569.00	70,235,804,989.00	100.05	(36,726,420.00)
	Pendapatan Bagi Hasil	51,067,646,569.00	51,280,916,831.00	100.42	(213,270,262.00)
	Bantuan Keuangan	19,131,432,000.00	18,954,888,158.00	99.08	176,543,842.00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	0.00	-	-
1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	-	-

	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0.00	0	-	-
2	Lain-lain Pendapatan	0.00	0	-	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1,249,191,785,079.00	1,067,524,025,260.48	85.46	181,667,759,818.52
					-
1	BELANJA OPERASI	821,099,686,148.00	733,712,141,186.00	89.36	87,387,544,962.00
1	Belanja Pegawai	442,041,603,322.00	415,391,897,772.00	93.97	26,649,705,550.00
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	317,450,405,889.00	314,963,806,042.00	99.22	2,486,599,847.00
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4,237,452,498.00	4,231,614,203.00	99.86	5,838,295.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	109,341,195,256.00	85,549,419,477.00	78.24	23,791,775,779.00
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10,124,309,850.00	9,785,801,390.00	96.66	338,508,460.00
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	177,359,829.00	150,376,660.00	84.79	26,983,169.00
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	710,880,000.00	710,880,000.00	100.00	0.00
	Belanja Pegawai BOS	0.00	0.00	-	0.00
2	Belanja Barang dan Jasa	307,217,327,661.00	258,864,737,069.00	84.26	48,352,590,592.00
	Belanja Barang	43,365,794,669.00	36,617,678,496.00	84.44	6,748,116,173.00
	Belanja Jasa	128,207,145,749.00	107,622,518,653.00	83.94	20,584,627,096.00
	Belanja Pemeliharaan	5,003,913,275.00	3,841,531,277.00	76.77	1,162,381,998.00
	Belana Perjalanan Dinas	70,563,644,579.00	56,980,394,660.00	80.75	13,583,249,919.00
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2,384,900,000.00	2,344,500,000.00	98.31	40,400,000.00
	Belanja Barang dan Jasa BOS	26,041,929,389.00	22,028,322,164.00	84.59	4,013,607,225.00

	Belanja Barang dan Jasa BLUD	31,650,000,000.00	29,429,791,819.00	92.99	2,220,208,181.00
3	Belanja Bunga	0.00	0.00	-	0.00
	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	-	0.00
4	Belanja Hibah	71,840,755,165.00	59,455,506,345.00	82.76	12,385,248,820.00
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	69,256,068,980.00	56,823,403,680.00	82.05	12,432,665,300.00
	Belanja Hibah Dana BOS	1,812,030,000.00	1,859,446,480.00	102.62	(47,416,480.00)
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	772,656,185.00	772,656,185.00	100.00	0.00
5	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	-	-
	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0.00	0.00	-	-
	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0.00	0.00	-	-
2	BELANJA MODAL	278,058,096,826.00	177,064,532,546.00	63.68	100,993,564,280.00
1	Belanja Modal Tanah	1,275,201,000.00	863,494,000.00	67.71	411,707,000.00
	Belanja Modal Tanah	1,275,201,000.00	863,494,000.00	67.71	411,707,000.00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53,800,347,971.00	25,467,265,171.00	47.34	28,333,082,800.00
	Belanja Modal Alat Besar	3,276,645,000.00	395,380,000.00	12.07	2,881,265,000.00
	Belanja Modal Alat Angkutan	200,000,000.00	179,770,304.00	89.89	20,229,696.00
	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	9,382,275.00	9,382,275.00	100.00	-
	Belanja Modal Alat Pertanian	6,954,500.00	6,952,700.00	99.97	1,800.00
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,186,590,389.00	2,462,932,441.00	58.83	1,723,657,948.00

	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1,120,000,000.00	1,100,081,999.00	98.22	19,918,001.00
	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	33,597,651,660.00	9,496,632,550.00	28.27	24,101,019,110.00
	Belanja Modal Alat Laboratorium	3,200,720,000.00	3,110,499,810.00	97.18	90,220,190.00
	Belanja Modal Komputer	3,633,660,656.00	3,121,647,465.00	85.91	512,013,191.00
	Belanja Modal Alat Eksplorasi	707,991,000.00	639,508,200.00	90.33	68,482,800.00
	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0.00	0.00	-	-
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	832,624,000.00	822,568,321.00	98.79	10,055,679.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2,678,128,491.00	4,111,053,106.00	153.50	(1,432,924,615.00)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	350,000,000.00	10,856,000.00	3.10	339,144,000.00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62,387,463,719.00	36,915,928,036.00	59.17	25,471,535,683.00
	Belanja Modal Bangunan Gedung	62,112,463,719.00	36,915,928,036.00	59.43	25,196,535,683.00
	Belanja Modal Monumen	200,000,000.00	0	-	200,000,000.00
	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	75,000,000.00	0	-	75,000,000.00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	159,399,152,016.00	110,093,447,527.00	69.07	49,305,704,489.00
	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	138,627,819,516.00	91,735,257,900.00	66.17	46,892,561,616.00
	Belanja Modal Bangunan Air	18,916,532,500.00	16,734,579,227.00	88.47	2,181,953,273.00
	Belanja Modal Instalasi	1,624,800,000.00	1,496,074,400.00	92.08	128,725,600.00
	Belanja Modal Jaringan	230,000,000.00	127,536,000.00	55.45	102,464,000.00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,195,932,120.00	3,724,397,812.00	311.42	(2,528,465,692.00)
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200,000,000.00	199,482,000.00	99.74	518,000.00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200,000,000.00	199,750,000.00	99.88	250,000.00

	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	795,932,120.00	3,325,165,812.00	417.77	(2,529,233,692.00)
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,000,000,000.00	168,302,500.00	16.83	831,697,500.00
1	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	168,302,500.00	16.83	831,697,500.00
	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	168,302,500.00	16.83	831,697,500.00
4	BELANJA TRANSFER	152,269,628,199.00	150,605,993,507.00	98.91	1,663,634,692.00
1	Belanja Bagi Hasil	2,278,479,499.00	1,137,999,764.00	49.95	1,140,479,735.00
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2,278,479,499.00	1,137,999,764.00	49.95	1,140,479,735.00
2	Belanja Bantuan Keuangan	149,991,148,700.00	149,467,993,743.00	99.65	523,154,957.00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	149,991,148,700.00	149,467,993,743.00	99.65	523,154,957.00
	JUMLAH BELANJA	1,252,427,411,173.00	1,061,550,969,739.00	84.76	190,876,441,434.00
	SURPLUS / DEFISIT	-3,235,626,094.00	5,973,055,521.48	(184.60)	
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65,592,789,406.00	65,492,789,406.00	99.85	100,000,000.00
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	65,492,789,406.00	65,492,789,406.00	100.00	0.00
	Penghematan Belanja	65,492,789,406.00	65,492,789,406.00	100.00	0.00
	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	-	0.00
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	-	0.00
	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0.00	0.00	-	0.00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100,000,000.00	0.00	-	100,000,000.00
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	100,000,000.00	0.00	-	100,000,000.00

	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0.00	0.00	-	0.00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	62,357,163,312.00	62,357,163,312.00	100.00	0.00
1	Penyertaan Modal Daerah	0.00	0.00	-	0.00
	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0.00	0.00	-	0.00
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	62,357,163,312.00	62,357,163,312.00	100.00	0.00
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	62,357,163,312.00	62,357,163,312.00	100.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	3,235,626,094.00	3,135,626,094.00		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	9,108,681,615.48		

Sumber Data : Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Enrekang merupakan perwujudan pertanggungjawaban tahunan atas Perubahan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018 - 2023. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Enrekang telah berakuntabilitas sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Enrekang serta pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Enrekang menjadi Pemerintah yang Amanah. Pemerintah Kabupaten Enrekang secara umum telah berhasil mencapai target kinerja Misi Sasaran dan Kegiatan dengan Tingkat Capaian Kinerja. Dari 5 (lima) Misi Sasaran yang ditetapkan pengelompokan capaian rata-rata adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi Capaian Misi	Jumlah Misi
1	Diatas 100%	1
2	96 % Sampai Dengan 100%	-
3	90 % Sampai Dengan 95 %	4

Misi Sasaran-sasaran yang mencapai target yang diharapkan antara lain:

- 1 MISI PERTAMA: Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (**Kategori Sangat Tinggi 91,25%**)

- 2 MISI KEDUA: Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing, Penguasaan Tehnologi, Bermoral, Beriman dan Bertaqwa (**Kategori Sangat Tinggi: 94,47%**)
- 3 MISI KETIGA: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi (**Kategori Tinggi: 92,02%**)
- 4 MISI KEEMPAT: Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Skala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri (**Kategori Sangat Tinggi: 102,53%**)
- 5 MISI KELIMA: Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan (**Kategori Sangat Tinggi: 91,33%**)

Enrekang, 07 Maret 2024
BUPATI ENREKANG,

Dr. H. BABA, SE. MM

